



**IMPLEMENTASI PROGRAM E-KTP BERDASARKAN UU NOMOR 24
TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DISDUKCAPIL
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh :

DANANG RAV SANJANI

2115500015

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Danang Rav sanjani

NPM : 2115500015

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul : Implementasi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang program e-KTP dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Tegal Tahun 2019 (Study kasus Kec. Talang, Kec. Kramat, Kec. Tarub)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar dibuat dan disusun sendiri bukan buatan hasil karya orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, saya mendapatkan sanksi akademis.

Tegal, 29 Januari 2021



Danang Rav sanjani
NPM: 2115500015



PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PROGRAM E-KTP BERDASARKAN UU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL DI DISDUKCAPIL KABUPATEN TEGAL

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1)
untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(29 Januari 2021)

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I

Drs. Djoko Suyono, M.Si
NIPY. 2451891957

Dosen Pembimbing II

Unggul Sugi Harto, S.IP.M.Si
NIPY. 14251921973



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Agus Setio Widodo, S.IP., M.Si

NIPY. 16952681974



YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Sekertariat: Jln. Halmahera KM. 1 Tegal Telp. (0283) 323290

PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PROGRAM E-KTP BERDASARKAN UU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DISDUKCAPIL KABUPATEN TEGAL

Telah dipertahankan dalam sidang terbuka skripsi Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Pada Hari: Selasa
Tanggal: 2 Febuari 2021

1. Ketua Dewan Penguji : Dra. Sri Sutjiatmi, M.Si
NIP. 196305271988032001
2. Sekertaris Dewan Penguji : Drs. Djoko Suyono, M.Si
NIPY. 2451891957
3. Anggota Dewan Penguji :DHA. Padma.Eldo, M.IP
NIPY. 2766861992

()

()

()



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Nuridin, SH. MH
NIPY. 9351091961

MOTTO

*“Nikmati Prosesnya jalani ikuti alurnya terkait hasil kita serahkan
kepada yang maha kuasa”*

“Danang Rav Sanjani”

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohiim dengan menyebut nama Allah SWT, segala sesuatu yang telah dapat ku raih semua atas Ridho-Mu. Dengan mengucap syukur atas segala limpahan Nikmat dan Karunia-Mu kepadaku. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan karya (SKRIPSI) ini untuk:

1. Keluargaku yang tercinta, Ibu Siti Buryanti yang selalu memberi dukungan melalui do'a dan dorongan, Alm. Bapak Watam, yang masih saya ingat betul pelajaran-pelajaran baik yang beliau berikan dalam hidup dan selalu memotivasi saya untuk semangat dalam menjalani tanggung jawab saya, dan untuk adikku Fatimah Azzahra yang selalu menjadi motivasi saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Diri saya dimasa depan, saya sudah melakukan semampu saya untuk menyelesaikan skripsi ini, sisanya aku serahkan padamu.
3. Teman-teman sepaket, Oktana Adhe Arfian yang selalu memberikan support dan mau berjuang bersama agar bisa lulus bareng tahun ini, Terlebih buat Moh Iqbal Maulana yang sudah membantu saya membuat skripsi ini, khususnya buat Faiq Taufiqur Rohman yang telah memfasilitasi selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Semua Dosen dan Dekan FISIP tanpa terkecuali yang sudah menjadi sumberinspirasi dan motivasi bagi pelaksanaan dan selesainya penelitian ini.
5. Teman-teman dari FISIP yang selama ini selalu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Nama Danang Rav sanjani, NPM 2115500015, 2020. : *Implementasi Program e-KTP berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal*. Skripsi, Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I: Drs. Djoko Suyono, M,Si dan Pembimbing II: Unggul Sugi Harto S.IP, M,Si. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang program e-KTP yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam mewujudkan Tertib administrasi dan untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat, dan solusi terkait pelaksanaan e-KTP dalam mewujudkan tertib administrasi di Kabupaten Tegal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha mendeskripsikan secara jelas tentang implementasi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang program e-KTP yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam mewujudkan Tertib administrasi dan untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat, dan solusi terkait pelaksanaan e-KTP dalam mewujudkan tertib administrasi di Kabupaten Tegal.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa; (1) implementasi Program e-KTP berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal sudah maksimal hal ini dibuktikan dari dilihat kendala yang ada, kebanyakan memang bukan menjadi kewenangan Disdukcapil karena pengadaan blangko dan teknis jaringan database pusat adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi bisa dikatakan bahwa pelaksanaan e-KTP yang dilakukan oleh disdukcapil sudah berjalan dengan baik. Disdukcapil juga mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti e-KTP (SUKET) yang bisa digunakan sebagai pengganti e-KTP untuk sementara sampai e-KTP bisa dicetak dan diterbitkan. (2) Faktor penghambat terkait Implementasi UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Program E-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal yaitu yang pertama kurangnya blangko dan jaringan yang terkadang eror ,meskipun Disdukcapil mengalami kendala , ada juga solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut yaitu dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa ketersediaan blangko dari Pemerintah pusat terbatas, Disdukcapil juga mengeluarkan SUKET (Surat Keterangan e-KTP) yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti e-KTP sementara.

Kata Kunci : *Implementasi, Program e-KTP, Tertib Administrasi Kependudukan Kabupaten Tegal*

ABSTRACT

Name Danang Rav sanjani, NPM 2115500015, 2020.: Implementation of the e-KTP program based on Law Number 24 of 2013 amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration at the Tega Regency Population and Civil Registration Service (Disdukcapil). (Case study of Talang District, Kec. Kramat, Kec. Tarub) Thesis, Governmental Science, Pancasakti University, Tegal. Advisor I: Drs. Djoko Suyono, M, Si and Supervisor II: Unggul Sugi Harto S.IP, M, Si. This research aims to describe how the implementation of Law Number 24 of 2013 concerning the e-KTP program carried out in the Office of Population and Civil Registration of Tegal Regency in realizing Administrative order and to find out the inhibiting factors and solutions related to the implementation of e-KTP in realizing an orderly administration in Tegal Regency. The type of research used is descriptive research

qualitative, namely the type of research that seeks to clearly describe the implementation of Law Number 24 of 2013 concerning the e-KTP program which is carried out in the Office of Population and Civil Registration of Tegal Regency in realizing administrative order and to determine the inhibiting factors and solutions related to the implementation of e- KTP in realizing orderly administration in Tegal Regency.

The results of the study illustrate that; (1) the Implementation of the e-KTP program based on Law Number 24 of 2013 amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration at the Tega Regency Population and Civil Registration Service (Disdukcapil) has been maximized, this is evidenced by the existing obstacles, most of which are not within the authority of Disdukcapil because technical central database network is the authority of the central government. So it can be said that the implementation of e-KTP by disdukcapil has gone well. Disdukcapil also issued a Certificate of Replacement for e-KTP (SUKET) which can be used as a substitute for e-KTP temporarily until the e-KTP can be printed and issued. (2) Inhibiting factors related to the implementation of Law Number 24 of 2013 concerning the E-KTP Program in Realizing an Orderly Population Administration in the Tegal Regency Population and Civil Registration Service (Disdukcapil), namely the first is the lack of blanks and the network that sometimes goes wrong, although Disdukcapil experiences problems, there are also a solution to solve these obstacles, namely by providing an understanding to the public that the availability of blanks from the central government is limited, Disdukcapil also issues SUKET (e-Keterangan e-KTP) which can be used by the community as a substitute for temporary e-KTP.

Keywords: *Implementation, e-KTP Program, Orderly Population Administration in Tegal Regency*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT pendengar semua doa, rumah semua harapan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh dalam Pengentasan Permukiman Kumuh di Kota Tegal”.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Prof. Dr. Fakruddin, M.Pd., Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan studi di UniversitasPancasakti Tegal.
- b. Dr. Nuridin, SH. MH., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan izin pelaksanaan penelitian.
- c. Agus Setio Widodo, S.IP, M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal yang telahmembantu dalam kelancaran skripsi ini.
- d. Drs. Djoko Suyono, M.Si dan Unggul Sugi Harto, S.IP. M.si dosen pembimbingyang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi yang sangatbermanfaat kepada peneliti demi terselesaikannya skripsi ini.

- e. Dra. Erny Rosyanti, M.Si dosen wali yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama peneliti melaksanakan studi di UniversitasPancasakti Tegal.
- f. Bapak/Ibu dosen dan staf TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membekali ilmu pengetahuan dan membantu terkait dengan administrasiselama peneliti menuntut ilmu di Universitas Pancasakti Tegal.
- g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, serta para staff, yang telah membantu dalam melaksanakan penelitian ini.
- h. Staff Disdukcapil Kec. Kramat, Kec. Talang, Kec. Tarub, dan Masyarakat yang telah membantu banyak peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Tegal, 29 Januari 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	i
Pernyataan Penulis	ii
Lembar Persetujuan Skripsi	iii
Lembar Pengesahan Skripsi	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
Datar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	9
I.3 Tujuan Penelitian	12
I.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1 Kerangka Teori	14
II.1.1 Penelitian Terdahulu	14
II.1.2 Teori Implementasi	17
II.1.3 Program e-KTP.....	26
II.1.4 Terdip Administrasi	39
II.1.5 Pengertian Penduduk dan Kependudukan	43
II.1.6 Pengertian Administrasi Kependudukan	48
II.2 Definisi Konsepsional	51
II.3 Pokok-Pokok Penelitian	52
II.4 Alur Pikir	54

BAB III METODE PENELITIAN

III.1 Jenis dan Type Penelitian	55
III.2 Jenis dan Sumber Data	56
III.3 Informan Penelitian	57
III.4 Teknik Pengumpulan Data... ..	58
III.5 Teknik dan Analisa Data	60
III.6 Sistematika Penulisan	63

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

IV.I Deskripsi Wilayah Kabupaten Tegal	65
IV.I.1 Kondisi Geografis Kabupaten Tegal	66
IV.I.2 Kondisi Demografis Kabupaten Tegal	69
IV.I.3 Kondisi Pemerintahan Kabupaten Tegal.....	75
IV.I.4 Sosial Ekonomi.....	78
IV.I.5 Kondisi Sosial Budaya	80
IV.I.6 Kondisi Kesehatan	85
IV.I.7 Sarana dan Prasarana Kabupaten Tegal	87
IV.II Deskripsi Wilayah Disdukcapil Kabupaten Tegal	88
IV.II.1 Letak Geografis Disdukcapil Kabupaten Tegal	88
IV.II.2 Sejarah Kantor Disdukcapil Kabupaten Tegal	89
IV.II.3 Jumlah Pegawai Disdukcapil	92
IV.II.4 Pendidikan Pegawai Disdukcapil Kabupaten Tegal	92
IV.II.5 Struktur Organisasi Disdukcapil Kabupaten Tegal	95
IV.II.6 Tugas Pokok dan Fungsi Disdukcapil Kabupaten Tegal ..	96

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Hasil Penelitian	112
1. Implementasi Program e-KTP	112
2. Tertib Adimistrasi Kpendudukan	147

V.2 Pembahasan Hasil Penelitian	177
---------------------------------------	-----

BAB VI PENUTUP

VI.1 Kesimpulan	191
-----------------------	-----

VI.2 Saran	192
------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel IV.01	Luas Wilayah Kabupaten Tegal Menurut Kecamatan dan Jenis Penggunaan Lahan 2019 (Ha)	70
Tabel IV.02	Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019.....	71
Tabel IV.03	Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2019	72
Tabel IV.04	Penduduk Kabupaten Tegal Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019	73
Tabel IV.05	Presentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut di. Kabupaten Tegal Tahun 2019.....	74
Tabel IV.06	Struktur Organisasi Kabupaten Tegal	76
Tabel IV.07	Presentase Disdukcapil PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016.....	79
Tabel IV.08	Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal Tahun 2018	86
Tabel IV.09	Sarana yang Terdapat Di Kbpupaten Tegal	87
Tabel IV.10	Prasarana yang Terdapat Di Kabupaten Tegal	88
Tabel IV.11	Jumlah Pegawai Disdukcapil Kabupaten Tegal	92
Tabel IV.12	Pendidikan Pegawai Disdukcapil Kabupaten Tegal.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.01 Peta Administrasi Kabupaten Tegal	67
Bagan IV.01 Struktur Organisasi Dan Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Surat Ijin Pra Research
Lampiran 3	Surat ijin Research
Lampiran 4	Foto-foto Wawancara
Lampiran 5	Berita acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 6	Berita acara ujian skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (IT) yang semakin pesat, menghasilkan manfaat positif bagi kehidupan manusia dan memberikan banyak kemudahan, seperti kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan bertransaksi karena segala kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tepat, sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperlihatkan bermunculannya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti dalam dunia bisnis (e-commerce), perbankan (e-banking), pemerintahan (eGovernment), data kependudukan (e-KTP), pendidikan (e-education, e-learning), kesehatan (e-medicine, e-laboratory), dan lain sebagainya yang kesemuanya itu berbasis elektronik. Pemerintah menerapkan e-Government yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggungjawab, responsif, efektif dan efisien. E-Government memanfaatkan kemajuan komunikasi dan informasi pada berbagai aspek kehidupan, serta untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain. Salah satu penerapan implementasi e-Government dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang Administrasi Kependudukan salah satunya adalah e-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk).

Sebagaimana yang di amanatkan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pada hakikatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Konsideran dalam undang-undang pemerintahan daerah menerangkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, salah satunya dalam pelayanan administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan sebagai salah satu pelayanan yang diberikan bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatakan bahwa Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat

memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan e-KTP yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan e-KTP maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki e-KTP lebih dari satu dan/atau dipalsukan e-KTP, mengingat dalam e-KTP tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan adalah melalui pemutakhiran database kependudukan; meningkatkan kualitas database kependudukan Kab/Kota, Provinsi dan Pusat melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan SIAK secara online dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Pusat; percepatan penguatan regulasi di daerah melalui Perda penyelenggaraan administrasi kependudukan serta diikuti dengan penegakan hukum (Law Enforcement) bagi pelanggaran administrasi kependudukan; penerapan awal (uji petik) KTP berbasis NIK secara Nasional yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip; pemberian NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011; menerapkan KTP berbasis NIK secara Nasional yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip (e-KTP).

(Dikutip dari website:

<https://disdukcapil.kuningankab.go.id/node/33#:~:text=Strategi%20yang%20dilakukan%20dalam%20rangka,secara%20on%20line%20dari%20Kabupaten%20F> di akses pada tanggal 27 November 2020)

Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) e-KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), polis asuransi, sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Pemerintah membuat kebijakan e-KTP baik bagi masyarakat, bangsa dan negara dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi. Selain itu, dengan adanya e-KTP ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI ilegal dan perdagangan , manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut untuk memalsukan identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwajib.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis Nomor

Induk kependudukan secara Nasional dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan tujuan pemerintahan menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis NIK secara Nasional.

Dalam rangka implementasi kebijakan program e-KTP yang telah berjalan. Sebagai pelaksanaan dari kebijakan pemerintah tersebut Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal telah melakukan program e-KTP di Kabupaten Tegal. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda No.9A, Karangjungkeng, Pakembaran, Kec. Slawi, Tegal, Jawa Tengah 52415

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal melayani masyarakat dari 18 Kecamatan, yaitu Adiwerna, Balapulang, Bojong, Bumijawa Dukhturi, Dukuhwaru, Jatinegara, Kedungbanteng, Kramat, Lebaksiu, Margasari, Pagerbarang, Pangkah, Slawi, Suradadi, Talang, Tarub, Warurejo. dengan jumlah penduduk 1.573.087 jiwa dan dikategorikan berdasarkan jenis kelamin sebanyak 804.519 jiwa (laki-laki), 774.913 jiwa (perempuan), yang wajib KTP sebanyak 1.193.181 jiwa, dari jumlah penduduk yang wajib e-KTP yang telah melaksanakan perekaman sebanyak 1.193.181 pada semester awal 2020. Yang artinya sudah seluruh wajib e-KTP telah melaksanakan perekaman. Dalam melayani masyarakat, DISDUKCAPIL Kabupaten Tegal memiliki 87 pegawai PNS, dan 14 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Disdukcapil sudah dianggap sudah siap untuk tempat Pelaksanaan Penerapan e-KTP. Hal ini dikarenakan bahwa Disdukcapil sudah memenuhi persyaratan untuk dapat menjalankan program e-KTP tersebut, yaitu telah tersedianya alat dan tenaga teknis yang sudah dilatih dan diberi pembekalan yang menangani pembuatan e-KTP. "Hal ini diperkuat oleh Ibu Dra. Cut Rimai Indarti selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. pukul 10:00 hari Kamis 06 Agustus 2020

Meskipun pemerintah Kabupaten Tegal telah melaksanakan program e-KTP tersebut dengan semaksimal mungkin, akan tetapi berdasarkan observasi awal yang ada di lapangan dan berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan, dalam proses pelaksanaan e-KTP terjadinya permasalahan yang tentunya menjadi kendala bagi pemerintah Kabupaten Tegal, diantaranya :

Pertama, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai Kabupaten Tegal sehingga kurangnya informasi tentang e-KTP yang diterima warga Kabupaten Tegal. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, terlihat bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dan kegunaan serta manfaat dari e-KTP tersebut, karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur dan cara pembuatan e-KTP tersebut.

(Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Cut Rimai Indarti selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Kamis 06 Agustus 2020)

Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Tegal terkait persyaratan pembuatan e-KTP. Permasalahan lain yang ditemukan berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di Kabupaten Tegal bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham dengan persyaratan apa saja yang harus dibawa. Dapat ditunjukkan dari masih banyaknya masyarakat yang belum lengkap membawa persyaratan dalam pembuatan e-KTP dikarenakan kurangnya informasi dari pihak Kabupaten Tegal mengenai persyaratan yang dibutuhkan.

(Sumber : Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi AdminDuk Bapak Slamet Iskandar S.IP Disdukcapil Kabupaten Tegal pada tanggal 19 oktober 2020)

Ketiga, Kurangnya ketersediaan blanko e-KTP, Kurangnya ketersediannya blanko e-KTP dikarenakan stok persediaan blanko habis dan harus menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan ketersediaan blanko e-KTP. Sedangkan Daftar tunggu cetak e-KTP di Kabupaten Tegal sebanyak 136.757 orang dan jumlah itu merupakan database dari tanggal 31 Desember 2019 hingga hari senin, 24 februari 2020. Menurut Supriyadi S.Sos,M.Si selaku kepala Disdukcapil Kabupaten Tegal, ratusan ribu orang yang masuk daftar tunggu tersebut ditargetkan selesai di akhir maret tahun ini. Namun dengan catatan ketersediaan blanko mencukupi dan itu juga memerlukan waktu yang cukup lama karena blanko yang di butuhkan tidak dapat di pastikan sampai saat ini untuk kesedian blanko di Kabupaten Tegal.

(*Sumber : <https://panturapost.com/136-757-warga-kabupaten-tegal-masuk-daftar-tunggu-antrean-cetak-e-ktp/> di akses tanggal 27 November 2020*)

Keempat, banyak wajib KTP yang sudah melakukan perekaman e-KTP, itu dilihat dari data di disdukcapil kabupaten tegal pada tahun 2020 yaitu 1.269.625, akan tetapi yang sudah mendapatkan cetak e-KTP adalah 815.796 atau sekitar 35,74% , jadi ada 453,829 jiwa yang sudah melakukan perekaman e-KTP namun belum mendapatkan cetak e-KTP.

(*Sumber : Laporan Kinerja Disdukcapil Semester 1 Tahun 2020 Kabupaten Tegal*)

Berdasarkan uraian diatas yang terjadi dalam pelaksanaan e-KTP di Kabupaten Tegal, maka diperlukan untuk memfokuskan penelitian pada bagaimana Mekanisme program e-KTP yang dilakukan di Kabupaten Tegal dalam mewujudkan tertib administrasi, dengan judul IMPLEMENTASI PROGRAM E-KTP BERDASARKAN UU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DISDUKCAPIL KABUPATEN TEGAL

I.2 Rumusan masalah

Secara umum (Notoadmojo) masalah adalah suatu kesenjangan (*gap*) antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi serta harapan dan kenyataan. Rumusan masalah menurut Sugiyono (2015; 56) merupakan suatu

pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data, bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Sedangkan Menurut Abdul Muthalib (2000; 25) Rumusan masalah ini pada hakikatnya adalah deskriptip tentang ruang lingkup masalah, pembatasan dimensi dan analisis variabel yang tercakup didalamnya.

Jadi berdasarkan pendapat di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang timbul dari suatu permasalahan dan harus di cari jawabanya berdasarkan data dan kenyataan dilapangan.

Dalam rangka implementasi program e-KTP yang telah berjalan. Sebagai pelaksanaan dari kebijakan pemerintah tersebut Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal telah melakukan program e-KTP di Kabupaten Tegal di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal , juga menganalisis beberapa faktor pendukung dan penghambat , sehingga menimbulkan suatu identifikasi masalah, diataranya sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai Kabupaten Tegal sehingga kurangnya informasi tentang e-KTP yang diterima warga Kabupaten Tegal.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat di Kabupaten Tegal terkait persyaratan pembuatan e-KTP Permasalahan lain yang ditemukan berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di Kabupaten tegal bahwa masih banyak masyarakat yang belum paham dengan persyaratan apa saja yang harus dibawa. Dapat ditunjukkan dari masih banyaknya

masyarakat yang belum lengkap membawa persyaratan dalam pembuatan e-KTP dikarenakan kurangnya informasi dari pihak Kabupaten Tegal mengenai persyaratan yang dibutuhkan.

3. Kurangnya ketersediaan blangko e-KTP, Kurangnya ketersediaannya blangko e-KTP dikarenakan stok persediaan blangko habis dan harus menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan ketersediaan blangko e-KTP. Sedangkan Daftar tunggu cetak e-KTP di Kabupaten Tegal sebanyak 136.757 orang dan jumlah itu merupakan database dari tanggal 31 Desember 2019 hingga hari senin, 24 februari 2020. Menurut Supriyadi S.Sos,M.Si selaku kepala Disdukcapil Kabupaten Tegal, ratusan ribu orang yang masuk daftar tunggu tersebut ditargetkan selesai di akhir maret tahun ini. Namun dengan catatan ketersediaan blangko mencukupi dan itu juga memerlukan waktu yang cukup lama karena blangko yang di butuhkan tidak dapat di pastikan sampai saat ini untuk kesediaan blangko di Kabupaten Tegal.
4. Banyak wajib KTP yang sudah melakukan perekaman e-KTP, itu dilihat dari data di disdukcapil kabupaten tegal pada tahun 2020 yaitu 1.269.625, akan tetapi yang sudah mendapatkan cetak e-KTP adalah 815.796 atau sekitar 35,74% , jadi ada 453,829 jiwa yang sudah melakukan perekaman e-KTP namun belum mendapatkan cetak e-KTP

Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan program e-KTP, dan untuk menjamin tetap terlaksananya kehidupan bernegara yang demokratis, Kemendagri perlu serius

menyelesaikan permasalahan e-KTP yang sudah muncul sejak pertama kali diluncurkan, karena fungsi e-KTP sangat penting sebagai basis data kependudukan. Hal ini juga dikarenakan, selain blanko e-KTP yang seringkali tidak ada, masyarakat juga berpotensi tidak lagi percaya dengan kelanjutan pembuatan e-KTP yang mana hal ini akan menyebabkan masyarakat menjadi malas untuk mengurus e-KTP. Dengan demikian, tujuan awal pembuatan e-KTP untuk menertibkan administrasi kependudukan menjadi tidak tercapai atau terhambat di tengah jalan

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program e-KTP yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal?
2. Faktor penghambat dan solusinya terkait pelaksanaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tegal?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, oleh sebab itu, dari rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program e-KTP yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

2. Untuk mengetahui Faktor penghambat dan solusinya terkait pelaksanaan e-KTP di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tegal?

2. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat-manfaat bagi pihak tertentu, yaitu sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan, yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini terutama mengenai Pelaksanaan tertib administrasi Kependudukan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan, Sebagai Pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pemerintahan
- b. Bagi peneliti, Bagi peneliti sebagai pengetahuan dan wawasan dibidang Pemerintah serta sebagai sarana untuk mengumpulkan dan mengelola data mengenai pengelolaan data e-KTP dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabuptaen Tegal.
- c. Bagi Masyarakat, Sebagai salah satu upaya pentingnya partisipasinya dalam mewujudkan Tertib Administrasi dalam pelaksanaan e-KTP.

- d. Bagi Pemerintah Kabupaten Tegal, Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan yang berbasis NIK

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik masalah yang di angkat untuk memungkinkan pembaca meningkatkan cakrawalanya dari segi tujuan dan hasil penelitian.

Definisi berikutnya dikemukakan oleh Marx dan Goodson (197:235) (dikutip dalam Moleong, 2004:57) yang menyatakan bahwa teori ialah aturan menjelaskan proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (1) hubungan – hubungan yang dapat diamati di antara kejadian – kejadian (yang dapat diukur), (2) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan – hubungan demikian, dan (3) hubungan – hubungan yang disimpulkan serta manifestasi hubungan empiris apa pun secara langsung.

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas, teori secara umum ditarik kesimpulan bahwa suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis.

II.1 Kerangka Teori

Teori merupakan landasan atau pedoman dalam memecahkan masalah yang relevan dengan kajian penelitian. Adapun dasar teori berkenaan penelitian ini mencakup beberapa hal sebagai berikut.

II.1.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN e-KTP DI KECAMATAN JIPUT KABUPATEN PANDEGLANG. Oleh : Idos Firdaus, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, pemerintah telah menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan administrasi yang tertib sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi program e-KTP dan mengetahui kendala mekanisme administrasi e-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. Teori yang digunakan untuk mendukung analisis implementasi program e-KTP ini yaitu, model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III yaitu Direct and Indirect Impact on Implementation. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive. Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini bahwa kebijakan tersebut belum efektif karena masih terdapat beberapa kekurangan dari pemerintah, yaitu; kemampuan sumber

daya pegawai yang kurang optimal, kurangnya fasilitas yang dibutuhkan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat, kurangnya koordinasi dan komunikasi, dan kurangnya pemberian pelayanan yang optimal.

Kedua, PELAKSANAAN e-KTP DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN. Oleh : Dwi Setyaningrum, Universitas Pancasakti.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian diskriptif maksudnya bertujuan untuk menggambarkan saat Pelaksanaan program e-KTP yang digunakan di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan e-KTP dalam mewujudkan tertib administrasi di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara / Interview, Dokumentasi, studi kepustakaan.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah data bersifat deskriptif, yaitu analisis data yang menggunakan penggambaran atas gejala dan kondisi yang ada yang dapat mewujudkan dalam keterangan sesuai keadaan yang sebenarnya peneliti akan dilakukan dilapangan.

Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Wiradesa sudah dilakukan sesuai prosedur dan sesuai dengan aturan yang ada (sesuai SOP), tetapi pelaksanaannya belum memenuhi harapan yang diinginkan, masih banyak kekurangan saat pelaksanaan berlangsung. Itu dilihat dari sosialisasinya, pelayanannya, serta sarana dan prasarana eKTP di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Saran untuk penelitian ini adalah agar dilakukan penelitian lebih lanjut tentang upaya-upaya yang harus dilakukan untuk selalu berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan program e-KTP.

II.I.2 Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi

sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat: (1) kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus, (2) dapat diimplementasikan dengan baik.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kebijakan menurut karakteristiknya adalah langsung mempraktekkan dalam bentuk program-program dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, kinerja dan program publik. Kebijakan tersebut sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa bisa berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan bisa memajukan daerahnya dalam menghadapi kemajuan masa yang akan datang. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat

pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan.

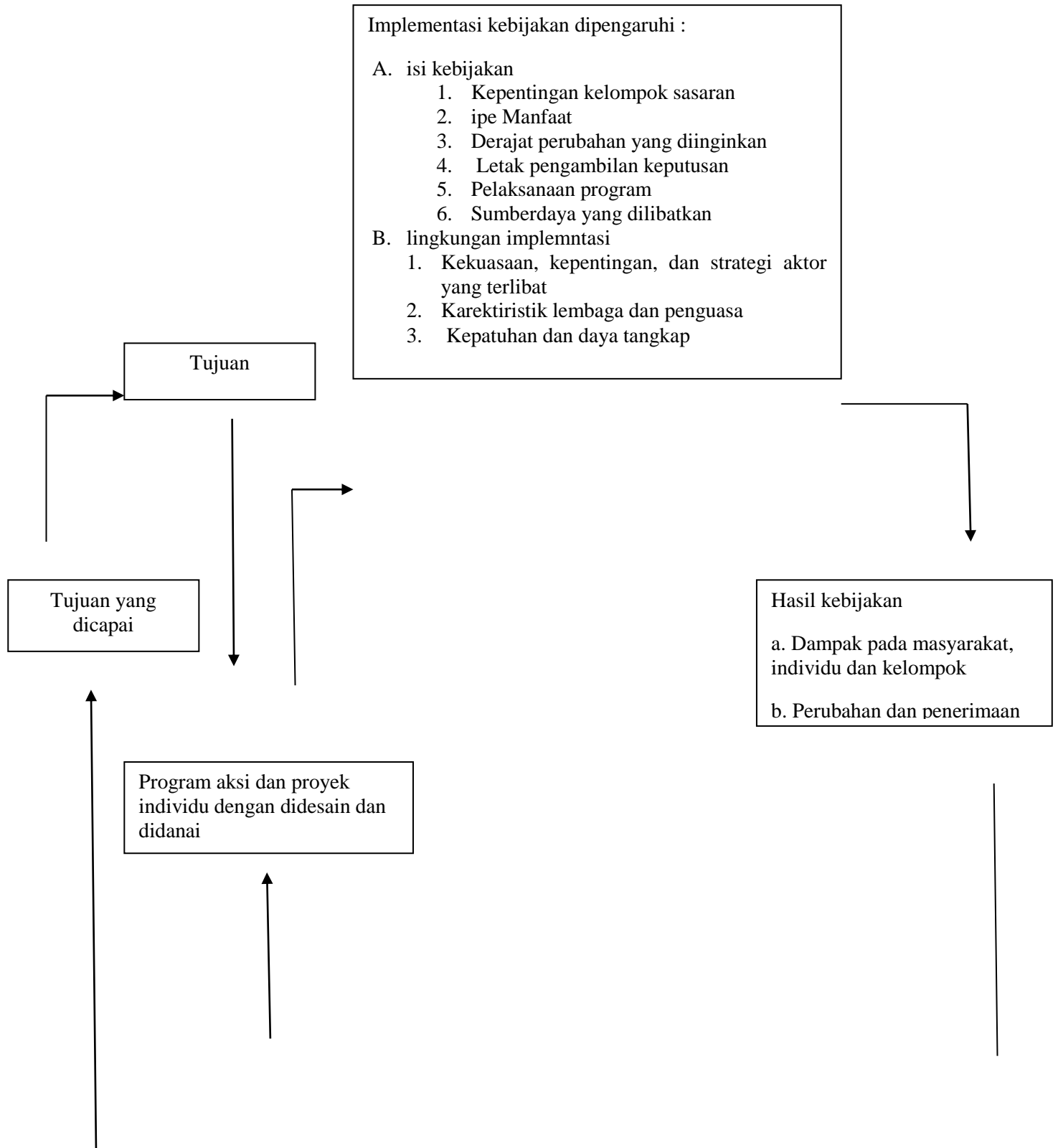
Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkan kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan.

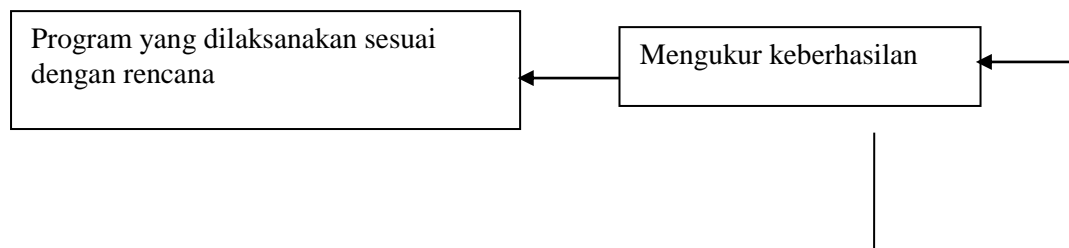
Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan. Pada umumnya, model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan. Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan “Implementation as a Political and Administrative Process”. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation) Isi

kebijakan meliputi: (1) interest affected, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) type of benefits, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, (3) extend of change envision, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas, (4) site of decision making, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (5) program implementer, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) resources committed, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

(2) institution an regime characteristic, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) compliance and responsiveness, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan

Gambar : 01 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut
(Merilee S. Grindle. 1980. Politics and Policy Implementation in the Third
World, Princeton University Press, New Jersey, p. 11)





Sumber : Merilee S. Grindle, 1980 : 11.(data diolah)

Berdasarkan penjelasan gambar diatas mengenai model Grindle ini, T.B. Smith mengakui, ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

Pada gambar diatas terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran

Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo, 2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah

adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa program tindakan yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik, jadi dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari pelaksana programnya..

11.1.3 Program e-KTP

A. Pengertian Program E-KTP

Sebuah kebijakan publik tidaklah muncul dengan sendirinya dan mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik dalam usaha menggapai tujuan yang telah ditetapkan haruslah melewati beberapa tahapan implementasi begitu juga KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang

memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (biodata, foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang tersimpan dalam fisik Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP).

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. Sejak tahun 2011, KTP non elektronik telah digantikan dengan KTP elektronik sesuai dengan Undang undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Proyek e-KTP dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberikan peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut ;

1. Menghindari Pajak

2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat diseluruh kota
3. Mengamankan korupsi
4. Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris)

Untuk mengatasi duplikasi tersebut menciptakan kartu Identitas multifungsi, digagaslah e-KTP yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik.

Autentikasi Biometrik adalah proses verifikasi identitas nasabah Bank yang menggunakan layanan Autentikasi Biometrik yang melibatkan pemindaian atau analisis beberapa bagian tubuh yang termasuk pada pemindaian Sidik Jari(Finggerprint), retina mata, DNA , bentuk wajah dan betuk gigi. Pada e-KTP yang digunakan adalah sidik jari. Tujuan penggunaan biometrik e-KTP adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah adanya pemalsuan

Dengan biometrik, autentifikasi dilakukan dua tahap, yakni :

1. Apa yang kamu punya melalui fisik kartu e-KPT,
2. Seperti apa kamu melalui identifikasi biometrik

Jika terjadi kehilangan kartu, ,maka orang yang menemukan kartu e-KTP milik orang lain tidak dapat menggunakannya karena akan dicek kesamaan biometriknya.

- b. Mencegah dengan adanya penggandaan

Dengan e-KTP , seluruh rekaman sidik jari penduduk akan disimpan di AFIS (Automated Finggerprint Identification System) yang berada

dipusat jakarta. Selain tujuan yang hendak dicapai, ,manfaat e-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut :

1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada.

Oleh karena itu sebagaimana dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah bertanggung jawab melakukan mobilisasi penduduk dalam hal ini penduduk wajib E-Ktp, mengalokasikan anggaran dan menyiapkan sarana prasarana (mesin sidik jari, rekam foto, blangko e-KTP) dan memberikan pelayanan e-KTP (Perekaman, Pencetakan dan Penerbitan E-Ktp)

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Westra (1989:236) mengatakan bahwa “program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya”. Siagian (dalam Westra 1989:124) mengatakan bahwa “penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu”. Lebih lanjut di jelaskan jika suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.

Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya, karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain lain untuk melaksanakan program tersebut (Bintoro 1987:181). repository.unisba.ac.id⁴⁹Ahli lainnya, yaitu Jones (1996:295) berpendapat bahwa “program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan”. Lebih lanjut Jones juga menjelaskan bahwa di dalam program dibuat beberapa aspek, yaitu mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.Strategi pelaksanaan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan.

Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan oleh Korten (dalam Jones 1996:232) bahwa “A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving

averral policy abjectives” atau suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)

SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah sebuah petunjuk buku yang sifatnya tertulis. SOP juga merupakan pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi berjalan secara efektif, konsisten, standard, dan sistematis. Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) e-KTP di Kabupaten Tegal sebagai berikut:

1. Petugas penerima berkas permohonan dan mengecek kelengkapannya selama 5 menit.
2. Petugas mencatat dibuku registrasi selama 2 menit.
3. Berkas yang telah memenuhi persyaratan diserahkan kepetugas operator yang selanjutnya dimintakkan paraf ke Kasubag PAT, Sekcam dan Camat selama 4 menit.
4. Perekaman atau pemotretan pemohon e-KTP selama 5 menit.
5. Mengentri data selama 5 menit.
6. Pencetakan e-KTP selama 3 menit.
7. Penyampaian e-KTP kepada pemohon selama 2 menit.

8. Dan yang terakhir pendokumentasian selama 2 menit.

C. Format & Keamanan e-KTP

Struktur KTP-el terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas. Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi KTP-el sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan KTP-el dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:

1. *Hole punching*, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip
2. *Pick and pressure*, yaitu menempatkan chip di kartu
3. *Implanter*, yaitu pemasangan antena (pola melingkar berulang menyerupai spiral)
4. *Printing*, yaitu pencetakan kartu
5. *Spot welding*, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik
6. *Laminating*, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman
7. e-KTP juga dilindungi dengan keamanan pencetakan tambahan seperti relief text, microtext, finger print, invisible ink dan warna yang berpendar dibawah sinar ultraviolet serta anti copy design.

D. Fungsi e-KTP & Pembuatan e-KTP

- a. Sebagai identitas jati diri

- b. Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya
- c. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP
- d. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan

Adapun Proses Pembuatan e-KTP secara umum adalah :

- a. **Datanglah ke kecamatan / kelurahan pada pagi hari:** untuk menghindari antrian saat membuat atau memperpanjang KTP Anda dapat datang lebih pagi ke kelurahan. Lalu berikan berkas dokumen ke petugas di loket dan Anda akan mendapatkan nomor antrian.
- b. **Pengambilan data :** Setelah nomor antrian dipanggil maka inilah saatnya pengambilan data Anda, awal biasanya Anda akan difoto, pengambilan tanda tangan digital, perekam data sidik jari, scan retina mata.
- c. Proses pelengkapan data akan berlangsung selama 15 menit dan proses pembuatan akan berlangsung paling lama 14 hari atau 2 minggu setelah Anda mengikuti semua persyaratan

E. PEMENDAGRI NO 8 TAHUN 2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang

dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

Peraturan ini menjelaskan tentang tata cara perekaman dan penerbitan dokumen KTP elektronik, yaitu :

Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el secara reguler bagi penduduk WNI yang belum memiliki KTP-el:

- a. penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan berupa:
 - 1) NIK; dan
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga.
- b. Petugas di tempat pelayanan KTP-el memproses dengan tata cara:
 - 1) merekam isi formulir permohonan KTP-el ke dalam database kependudukan;
 - 2) melakukan verifikasi data penduduk secara langsung;
 - 3) melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari penduduk, dan iris mata;
 - 4) membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP-el pada Formulir Permohonan;
 - 5) formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4) sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari, dan iris mata penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3);

- 6) melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP-el;
- 7) data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada angka 6) dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- 8) data penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 7) disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalanjatidiri seseorang;
- 9) hasil identifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 8), apabila:
 - a) identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP-el; dan
 - b) identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP-el.
- 10) dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 9) huruf a ke dalam blangko KTP-el;
- 11) setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 10), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mendistribusikan KTP-el ke tempat pelayanan KTP-el;
- 12) menerima KTP-el dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidikjari penduduk 1 : 1;
- 13) hasil verifikasi sidikjari penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 12
 - a) apabila datanya sama, maka KTP-el diberikan kepada penduduk;

b) apabila datanya tidak sama, maka KTP-el tidak diberikan kepada penduduk.

14) dalam hal terdapat data yang tidak sama sebagaimana dimaksud pada angka

15) huruf b, Petugas di tempat pelayanan KTP-el mengembalikan KTP-el ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan.

a. penduduk dapat mengambil KTP-el apabila membawa Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4

b. database kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7 dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

F. Keunggulan & kelemahan e-KTP

Berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di situs resmi KTP-el, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang diterapkan di Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan KTP-el yang diterapkan di RRC dan India. KTP-el di Indonesia lebih komprehensif. Di RRC, Kartu identitas elektronik (e-IC) nya tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Di sana, *e-IC* hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas. Sedang di India, sistem yang digunakan untuk pengelolaan data kependudukan adalah sistem UID (*Unique Identification Data*).

Kelemahan e-KTP masih menimbulkan kelemahan misalnya tidak tampilnya tanda tangan si pemilik di permukaan e-KTP. Tidak tampilnya tanda

tangan didalam e-KTP tersebut telah menimbulkan kasus tersendiri bagi sebagian orang. Misalnya ketika melakukan transaksi dengan lembaga perbankan, e-KTP tidak diakui adanya tampilan tanda tangan. Akhirnya pihak pemegang e-KTP terpaksa harus meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk meyakinkan bank .

dikutip dari <http://zafnatpaneyyah.blogspot.com/2013/01/pembahasan-e-ktp-kart-tanda-penduduk.html> Di akses pada Tanggal 27 November 2020

II.I.4 Pengertian Penduduk dan Kependudukan

1. Pengertian Penduduk

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, apakah kependudukan itu? Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pendudukan adalah peran penting dalam peranannya sebagai tujuan, pelaksana, sekaligus sebagai pengguna hasil-hasil pembangunan. Dinamika penduduk selalu berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan yang meliputi ideologi-politik, ekonomi sosial-budaya maupun pertahanan dan keamanan. Segingga negara mempunyai kepentingan menentukan kebijakan kenegaraan dan pemerintahan yang tepat bagi peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kepada penduduk dapat dilakukukan dengan efektif dan efisien.

Seperti apa yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2006 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa penduduk adalah orang yang matranya sebagai diri pribadi. Anggota, keluarga, masyarakat,, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal disuatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.

Pembangunan yang baik membutuhkan perencanaan pembangunan yang matang, dan kependudukan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan tersebut, sebagai contoh dalam perencanaan pembangunan kesehatan anak diperlukan jumlah penduduk usia dibawah 15 tahun: contoh lain kebutuhan data pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada) diperlukan data penduduk usia 17 tahun. Data kependudukan yang lengkap dan akurat akan menyempurnakan perencanaan pembangunan yang akan dibuat sehingga akan menghasilkan pembangunan yang efisien dan berkesinambungan. kelengkapan data kependudukan sangat didukung oleh sumber data misalnya ; data regristrasi, data sensu penduduk, data survey, dan data lainnya.

Bagi Negara maju misalnya ; Amerika Serikat, Jepang, Negara-negara Eropa barat dan Skandinavia, Australia, Data kependudukan lebih lengkap dan akurat dibanding negara berkembang seperti ; Indonesia, India, Bangladesh, Negara-negara Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika. Pemerintah di Negara maju lebih apresiasif terhadap data kependudukan, memandang data kependudukan sebagai data yang sangat penting, sebaliknya di banyak Negara berkembang data kependudukan belum dianggap sebagai data yang penting bagi pembangunan. Sekalipun data kependudukan di beberapa negara berkembang cukup lengkap tetapi sering diragukan realitasnya. Kelengkapan dan akurasi data kependudukan dapat bermanfaat dalam menangani masalah-masalah yang muncul misalnya ; data pemilu, penanganan bencana alam, pembangunan sarana kesehatan pendidikan bahkan masalah-masalah kejahatan yang muncul di kota-kota besar.

2. Pengertian Kependudukan

Kependudukan upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Kependudukan sebagai sebuah multidisiplin ilmu (*studies*) yang memfokuskan pada berbagai persoalan kehidupan manusia menunjukkan *space* kependudukan yang sangat luas. Keluasan studi kependudukan memungkinkan

untuk memberikan penjelasan fenomena social, budaya, ekonomi, ketahan, lingkungan fisik yang dihadapi oleh penduduk baik dalam wilayah pedesaan pertanian, pesisir maupun perkotaan.

Kependudukan merupakan sebuah ilmu yang objeknya manusia secara agregat memenuhi unsur unsur pengetahuan tersebut:

a. Kependudukan bersifat empiris

berarti bahwa kependudukan sebagai ilmu pengetahuan didasarkan pada observasi/pengamatan terhadap fakta/kenyataan di lapangan tentang dinamika penduduk bukan fenomena yang abstrak (tidak dapat diindera), selain itu juga berdasarkan akal sehat (*common sense*)¹⁹ sehingga hasil pengamatan tersebut tidak spekulatif. Kependudukan mempunyai sifat empiris ini dapat dilihat dari beberapa gejala kependudukan misalnya: 'jumlah penduduk' gejala jumlah penduduk yang terus meningkat merupakan fakta yang empiris artinya dapat lihat oleh siapa saja yang ingin menelaahnya, gejala tersebut ditelaah faktor faktor yang mendorong pertumbuhan penduduk tersebut berdasarkan akalsehat bukan perkiraan atau spekulatif.

b. Kependudukan bersifat teoritik

Artinya kependudukan sebagai ilmu pengetahuan selalu menyusun abstraksi/penyederhanaan dari hasil observasi. Abstraksi merupakan kerangka unsur unsur yang tersusun secara logis dengan maksud menjelaskan sebab akibat suatu gejala kependudukan sehingga menjadi teori kependudukan. Gejala 'jumlah penduduk' tersebut di atas

berdasarkan observasi menghasilkan abstraksi : 'jumlah penduduk terus meningkat sebagai akibat tingkat fertilitas yang tinggi'. Abstraksi ini sebagai teori kependudukan, tentu saja tidak diperlukan pembuktian sebab variabel fertilitas adalah variabel penyebab yang pasti bagi pertumbuhan penduduk

c. Kependudukan bersifat komulatif

artinya bahwa teori teori kependudukan dibangun atas dasar teori yang telah ada sebelumnya dengan cara memperbaiki, memperluas dan menggabungkan teori teori yang telah lama ada. Sebagai contoh teori '*jumlah penduduk terus meningkat sebagai akibat tingkat fertilitas yang tinggi*'; teori ini diperbaiki berdasarkan hasil observasi dikemudian hari hasilnya adalah sebuah teori '*jumlah penduduk terus meningkat sebagai akibat tingkat fertilitas yang tinggi dan tingkat mortalitas yang semakin rendah*'. Jika pada teori pertama menyatakan penyebab pertumbuhan penduduk yang meningkat adalah fertilitas, maka pada teori kedua menyatakan bahwa penyebab pertumbuhan penduduk yang meningkat adalah fertilitas dan mortalitas

d. Kependudukan bersifat non-etis

artinya yang dipersoalkan Kependudukan bukanlah baik-buruknya fakta (gejala kependudukan), akan tetapi menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

http://bumiindonesiapertiwi.blogspot.com/2013/07/kependudukan-sebagai-ilmu-pengetahuan_3.html Diakses pada Tanggal 27 November 2020

3. Penduduk dan Kependudukan

Penduduk adalah orang yang berdomisili atau bertempat tinggal menetap di wilayah suatu negara dan telah memiliki syarat menurut undang-undang. Sedangkan yang disebut bukan penduduk adalah orang yang berada di wilayah negara untuk sementara serta tidak bermaksud bertempat tinggal tetap di negara itu. Adanya perbedaan itu maka berbeda pula hak dan kewajibannya. Penduduk boleh mendirikan suatu perkumpulan dan boleh melakukan suatu pekerjaan, bukan penduduk tidak memiliki hak dan kewajiban itu. Sedangkan Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Meliputi di dalamnya ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

II.I.5 Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (pasal 1 ayat (1) Undang undang No. 23 Tahun 2006).

Maka Administrasi Kependudukan haruslah diselenggarakan dengan baik, didalam penjelasan atas Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

kependudukan, menjelaskan bahwa ; Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan.(Penjelasan Undang undang No. 23 Tahun 2006)

Administrasi kependudukan memuat tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah dating untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahirmati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan dan perlu didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Dengan demikian, setiap

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. (Mftha Thoha ,2008 : 85)

Salah satu hal yang terpenting adalah pengguna Nomor Induk Kependudukan (NIK) Yang merupakan identitas penduduk indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan. *NIK bersifat unik, tunggal, khas pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk indonesia dan berkaitan secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.*

Dari definisi definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa tertib administrasi kependudukan adalah kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya) dengan tujuan untuk pengarsipan berkas Kependudukan agar tidak tumpang tindih sehingga data yang terekam benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Fungsi Tertib administrasi dan Kependudukan

Pertama, Tertib Database Kependudukan meliputi terbangunnya database kependudukan yang akurat di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat; database kependudukan Kabupaten/ Kota tersambung (online) dengan Provinsi dan Pusat dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); database kependudukan Depdagri dan daerah tersambung (online) dengan instansi pengguna.

Kedua, Tertib Penerbitan NIK meliputi NIK diterbitkan setelah penduduk mengisi biodata penduduk per keluarga (F-1.01) dengan menggunakan sistem SIAK.

Ketiga, Tertib Dokumen Kependudukan (KK, KTP, Akta Pencatatan Sipil) meliputi prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; tidak adanya dokumen kependudukan ganda dan palsu.

b. Tujuan Tertib Administrasi dan Kependudukan

Tujuan Tertib Administrasi dan Kependudukan ini bertujuan supaya masyarakat tertib administrasi yang mempunyai manfaat diantaranya memberikan kejelasan identitas dan status penduduk, kepastian hukum, perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya, serta memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi lainnya.

(Sumber:., <https://bangka.tribunnews.com/2016/08/28/dokumen-administrasi-kependudukan-sangat-penting>. di akses tanggal 28 Desember 2010)

II.2 Definisi Konseptual

Menurut Masri Sirangimbun (1985) yang dimaksud dengan konsep adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang di pakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena alami atau dengan kata lain bahwa konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama. Konsep dapat diartikan sebagai unsur dari suatu penelitian yang berupa definisi, yang mana penjabaran secara umum ini digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu gejala sosial yang menjadi objek penelitian.

Jadi definisi konsep adalah definisi yang menggambarkan suatu abstrak dari hal – hal yang perlu diamati sehingga akan mempermudah penelaahan dan penjernihan masalah – masalah agar mudah dimengerti, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai arti yang digunakan dalam penelitian. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

1. Implementasi adalah kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkan kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.
2. Program e-KTP adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan Program e-KTP dalam suatu rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya. dengan melakukan, 1) mobilisasi penduduk, dalam hal ini penduduk yang wajib E-Ktp, 2) menyiapkan sarana prasarana (mesin sidik jari, rekam foto, blangko e-KTP) dan 3) memberikan pelayanan e-KTP (Perekaman, Pencetakan dan Penerbitan E-Ktp)

II.3 Pokok-pokok Penelitian

Dengan adanya konsep yang masih abstrak, maka konsep tersebut perlu diubah menjadi bentuk–bentuk yang lebih khusus menggunakan ukuran–ukuran atau

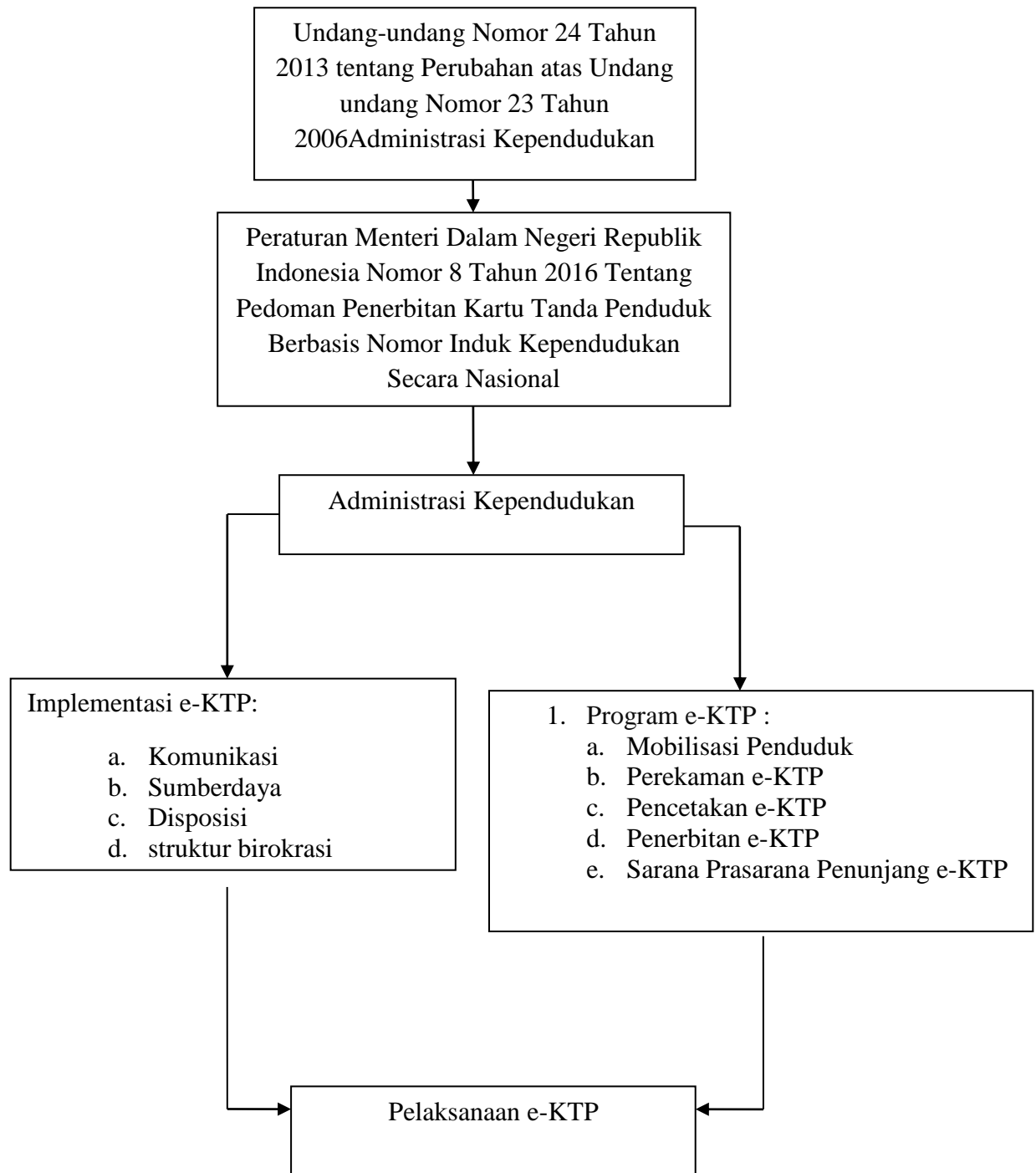
indikator serta gejala–gejala yang dominan. Pokok–pokok penelitian merupakan terjemahan secara terinci tentang konsep–konsep yang ada dalam penelitian dari penelitian. Adapun salah satu fungsinya yaitu untuk memberi petunjuk bagaimana suatu variabel yang diteliti itu dapat diukur dengan indikator–indikatornya. Berikut indikator–indikator IMPLEMENTASI PROGRAM E-KTP BERDASARKAN UU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DISDUKCAPIL KABUPATEN TEGAL

Pokok Penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah dengan indikator sebagai berikut;

1. Implementasi secara umum dapat di ukur dari indikator :
 - a. Komunikasi
 - b. Sumberdaya
 - c. Disposisi
 - d. struktur birokrasi.
2. Program e-KTP secara umum dapat di ukur dari indikator :
 - a. Mobilisasi Penduduk
 - b. Perekaman e-KTP
 - c. Pencetakan e-KTP
 - d. Penerbitan e-KTP
 - e. Sarana Prasarana Penunjang e-KTP

II.4 Alur Pikir

Dalam Melakukan peneilitian ini, Penulis menggunakan alur pikir yang akan dijelaskan melalui bagan dibawah ini,



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Menurut Adapun Ndraha, (1997), adalah metodologi yang digunakan untuk program dan kegiatan penelitian. Mengingat terdapat aneka ragam sasaran kajian dan masalah penelitian, metode sebagai jalan, alat, cara dan pendekatannya pun bermacam – macam. Dan Menurut Menurut Ali, (1995:1028) Metode adalah suatu yang teratur dan terpicir baik – baik untuk mencapai tujuan atau tatcara yang tersistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Penelitian merupakan suatu proses dan sesuai rangkaian usaha yang dilakukan secara sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan – pertanyaan tertentu.

Jadi Metode Penelitian pada dasarnya adalah suatu ilmu tentang metode – metode ilmiah sebagai cara kerja yang digunakan dalam kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan.

III.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Menurut Sugiono (2006;4), membedakan penelitian tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi,serta analisis dan jenis datanya. Menurut tingkat eksplanasinya, Sugiono (2006;11) mengelompokkan penelitian menjadi:

- a. Penelitian Eksplorasi (Eksploratif)

Penelitian ini bersifat menjelajah, bertujuan untuk memperdalam pengetahuan suatu gejala tertentu atau mendapat ide-ide baru mengenai gejala-gejala itu dengan maksud untuk mendapatkan penemuan masalah secara lebih terperinci atau untuk mengembangkan hipotesis.

b. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan. Dalam bukunya Prof. Sugiono, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain..

c. Penelitian Asosiatif atau hubungan

Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan ke empat tipe penelitian diatas, tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe penelitian deskriptif, tipe penelitian ini digunakan agar dapat memberi gambaran yang lebih rinci, artinya peneliti ingin mendeskripsikan tentang Implementasi Program e-KTP Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi dan Kependudukan Dikabupaten Tegal.

III.2 Jenis dan Macam Data

Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa instrumen penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui wawancara langsung dengan responden dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu Kecamatan Talang dan Disdukcapil kab tegal.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung langsung. Data ini diperoleh melalui monografi, laporan-laporan, dokumen-dokumen, brosur-brosur dan data-data lain yang telah dipublikasikan baik dalam surat kabar maupun media massa yang lain.

III.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat..

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Oleh karena peneliti akan mengambil pihak-pihak yang terkait dengan Implementasi Program e-KTP dalam mewujudkan tertib administrasi dan kependudukan di kabupaten tegal. Dalam penelitian ini bertindak sebagai informan berjumlah orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 3 orang
2. Masyarakat 3 orang

Jumlah informan 6 orang

III.4 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena data digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun data tersebut diperoleh dari berbagai metode yang nantinya akan diolah dan dianalisis menggunakan suatu metode tertentu. Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah :

- A. Observasi adalah Suatu proses yang kompleks, suatu proses yang disusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dengan aspek terpenting, antaranya proses pengamatan dan ingatan. Metode ini digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Sutrisnohadi (1986) dalam buku Metode Penelitian Administrasi (Sugiyono, 2006:166)

Dalam penelitian ini digunakan metode observasi non partisipan, dimana peneliti hanya sebagai pengamat. Peneliti meneliti bagaimana mengenai Pelaksanaan e-KTP. Selain itu observasi juga perlu peneliti lakukan terhadap masyarakat yang telah mendapatkan dan menggunakan

jasa dari program pelaksanaan e-KTP. Sehingga nanti peneliti akan mengetahui bagaimana proses pelaksanaanya, kendala, dampak yang dirasakan hingga strategi pemerintah dalam peningkatan program e-KTP sebagai tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Tegal.

- B. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan Tanya jawab, kemudian hasil wawancara tersebut dapat di konstruksikan menjadi suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Selanjutnya akan melakukan wawancara kepada subyek penelitian, agar memperoleh data terkait Pelaksanaan e-KTP dalam penanganan tertib Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk menemukan hubungan antara beberapa fenomena yang yang terjadi sehingga nantinya akan didapatkan kesimpulan dalam penelitian ini.

- C. Studi Kepustakaan adalah usaha untuk pengumpulan data yang merupakan studi kepustakaan dengan cara membaca literatur, majalah-majalah, atau surat kabar yang ada hubungannya dengan materi yang diteliti. Jadi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang utama, yaitu wawancara dan kuesioner. Sedangkan teknik pendukungnya adalah observasi dan studi kepustakaan.
- D. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal-pasal

yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini dokumen (Bogdan, 240) menyatakan bahwa hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/ dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Metode dokumentasi dapat mendukung data-data dalam penelitian agar lebih valid. Dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga penelitian bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus. Foto-foto ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar.

III.5 Teknik dan Analisis Data

Menurut Matthew Miles dan Michael Huberman (1984) dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Prof Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif yaitu teknik analisis interaktif, yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang digunakan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkatagorisasikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga dapat ditarik dan di verifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika di perlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit.

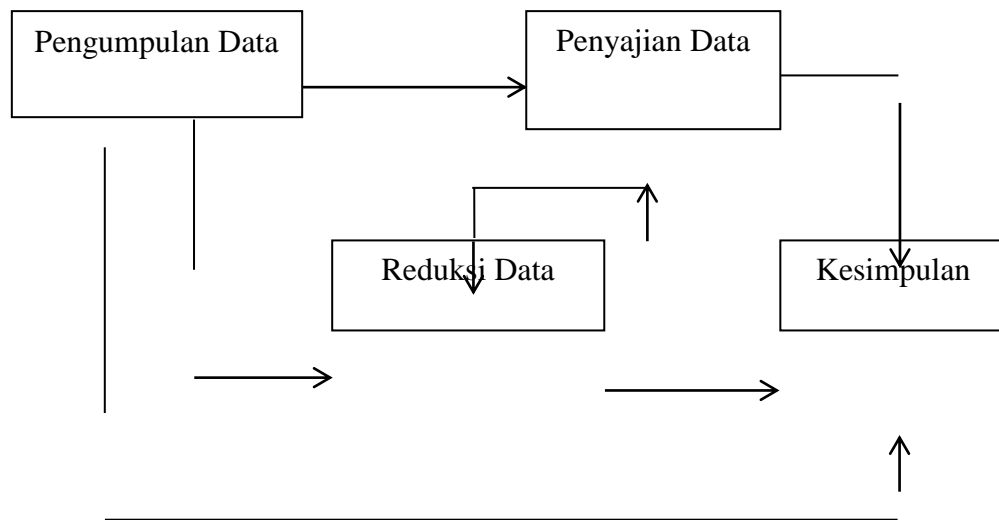
3. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskripsi. Data yang disajikan merupakan data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penyajian data di arahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah di pahami, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar katagori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang releven sehingga informasi yang di dapat di simpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data, juga merupakan tahap akhir dari pengeloaan data, Pada tahap ini peneliti akan kesimpulan dari semua data yang telah di peroleh sebagai hasil dari peniliti. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan lebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Skema analisis data menurut Miles and Huberman dikutip Mungin, Burhan (2003:56) sebagai berikut :



Miles and Huberman

III.6 Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan suatu penelitian diperlukan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memudahkan penelitian, langkah-langkah penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu
2. Kerangka Teori
3. Definisi Konsep

4. Pokok-pokok Penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Tipe Penelitian
2. Jenis dan Sumber Data
3. Informan Penelitian
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Teknik dan Analisa Data
6. Sistematika Penelitian

BAB IV DESKRIPTIF WILAYAH PENELITIAN

BAB V HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian
2. Pembahasan

BAB VI PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Deskripsi daerah penelitian merupakan gambaran secara umum tentang daerah tempat penelitian tersebut berlangsung. Uraian tentang daerah penelitian penting untuk memberi gambaran secara umum, baik mengenai potensi maupun masalah secara umum yang ada di daerah penelitian. Lokasi penelitian ini diambil pada Desa/Kelurahan di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintahan Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam

menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota.

Untuk mengetahui maksud dibentuknya kecamatan dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat dipahami melalui ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa: "Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

IV.I Deskripsi Wilayah Kabupaten Tegal

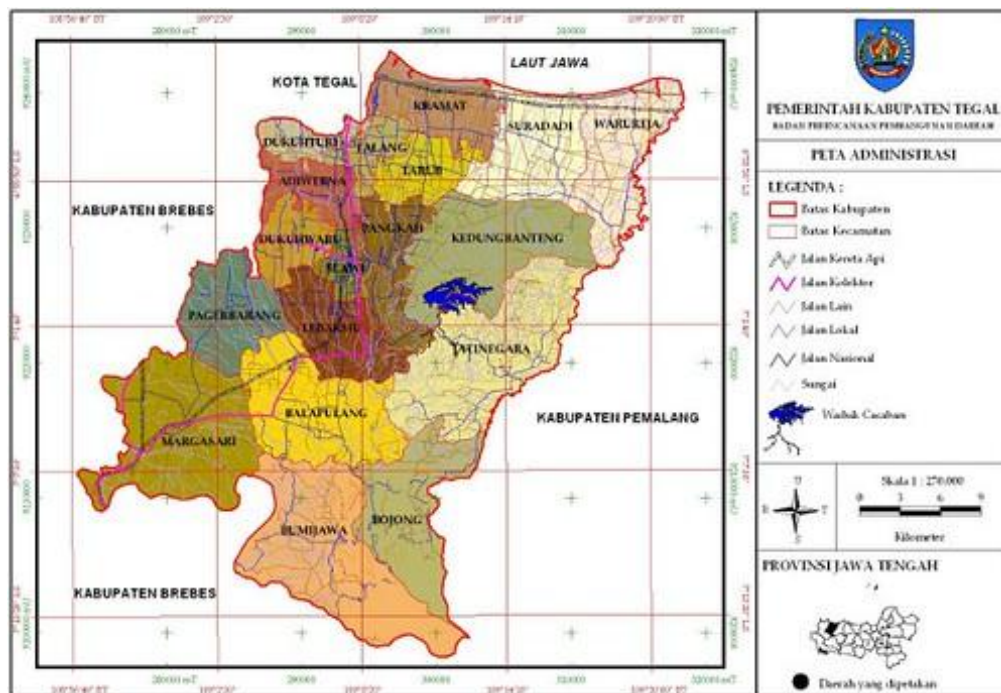
IV.I.1 Kondisi Geografis Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara 108°57'6" s/d 109°21'30" Bujur Timur dan 6°50'41" s/d 7°15'30" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 878,79 km persegi, yang terbagi dalam 18 kecamatan dengan 281 desa dan 6 kelurahan. Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal.

Batas-batas wilayah Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
- Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa

Gambar IV.1
Peta Administrasi Kabupaten Tegal



Sumber: http://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=14 diakses tanggal 13 Januari 2021

Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu :

1. Daerah pantai/pesisir meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja (3 kecamatan dengan 43 desa/kelurahan)

2. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah (10 kecamatan dengan 159 desa/kelurahan)
3. Daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng (5 kecamatan dengan 85 desa)

Visi dan Misi Kabupaten Tegal

A. Visi

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia.

B. Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

IV.I.2 Kondisi Demografi Kabupaten Tegal

Kondisi demografi merupakan suatu kondisi yang menjelaskan terkait kependudukan warga masyarakat yang ada ditempat tersebut. Dengan tujuan mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial, menjelaskan pertumbuhan masa lampau, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data yang tersedia. Kondisi demografi ini meliputi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut kelompok umur, jumlah rumah tangga, luas jumlah penduduk desa, jumlah penduduk menurut kewarganegaraan, jumlah kelahiran, jumlah kematian dan jumlah penganut agama.

Tabel IV.01
Luas Wilayah Kabupaten Tegal
Menurut Kecamatan dan Jenis Penggunaan Lahan 2019 (Ha)

No.	Kecamatan	Sawah *)	Bukan Sawah	Jumlah	Sawah (%)	Bukan Sawah (%)
1	Margasari	3.489	5.194	8.683	9,01	10,57
2	Bumijawa	2.280	6.576	8.856	5,89	13,38
3	Bojong	2.245	3.607	5.852	5,80	7,34
4	Balapulang	3.152	4.339	7.491	8,14	8,83
5	Pagerbarang	2.752	1.548	4.300	7,10	3,15
6	Lebaksiu	2.719	1.376	4.095	7,02	2,80
7	Jatinegara	2.111	5.851	7.962	5,45	11,9
8	Kedungbanteng	1.379	7.383	8.762	3,56	15,02
9	Pangkajene	1.448	2.103	3.551	3,74	4,28
10	Slawi	375	1.014	1.389	0,97	2,06
11	Dukuhwaru	1.836	794	2.630	4,74	1,62
12	Adiwerna	989	1.397	2.386	2,55	2,84
13	Dukuhturi	624	1.124	1.748	1,61	2,29
14	Talang	1.202	637	1.839	3,10	1,30
15	Tarub	1.742	940	2.682	4,50	1,91
16	Kramat	2.157	1.692	3.849	5,57	3,44
17	Suradadi	4.131	1.442	5.573	10,66	2,93
18	Warureja	4.104	2.127	6.231	10,60	4,33
Jumlah		38.735	49.144	87.879	100	100

*) Termasuk lahan yang diusahakan di kawasan hutan

Sumber: (Kabupaten Tegal dalam angka.BPS 2019. Hal 51)

Dari tabel IV.01 dapat diketahui keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tegal menurut kecamatan dan jenis penggunaan lahan tahun 2018 (ha), mencakup luas sawah maupun bukan sawah yakni 87.879 (ha). Luas keseluruhan lahan sawah adalah 38.735 (ha) dan luas keseluruhan lahan bukan sawah adalah 49.144 (ha). Dan dari 18 kecamatan, kecamatan Bumijawa yang memiliki lahan terluas yakni 5,89 % sawah (2.280 ha) dan 13,38 % bukan sawah (6.576 ha) dimana total luasnya adalah 8.856 (ha)..

Tabel IV.02
Penduduk Kabupaten Tegal
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase %
	Laki-laki	Perempuan		
Margasari	47.560	48.405	95.965	6,69
Bumijawa	42.212	42.448	84.660	5,90
Bojong	30.201	31.941	62.142	4,34
Balapulang	40.594	41.548	82.142	5,73
Pagerbarang	26.165	26.581	52.746	3,67
Lebaksiu	40.975	43.065	84.040	5,86
Jatinegara	26.796	27.395	54.191	3,78
Kedungbanteng	20.326	20.157	40.483	2,82
Pangkajene	50.741	50.607	101.348	7,06
Slawi	35.414	36.811	72.225	5,03
Dukuhwaru	29.523	30.361	59.884	4,17
Adiwerna	60.189	59.688	119.877	8,36
Dukuhturi	44.808	44.315	89.123	6,21
Talang	51.324	50.988	102.312	7,13
Tarub	39.507	39.059	78.566	5,48
Kramat	55.288	56.422	111.710	7,75
Suradadi	40.687	41.022	81.709	5,69
Warureja	30.201	30.191	60.392	4,21
Jumlah (%)	712.511 (49,70%)	721.004 (50,30%)	1.433.515 (100%)	100,15

Sumber : Kabupaten Tegal dalam angka.BPS 2019. Hal 50)

Dari tabel IV.02 dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2018 yaitu jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 712.511 (49,70) penduduk, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 721.004 (50,30%) penduduk dari total keseluruhan 1.433.515 penduduk Kabupaten Tegal.

Tabel IV.03
Penduduk Kabupaten Tegal
Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2019

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase %
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	121.080	18,77
Industri Pengolahan	139.419	21,61
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	188.514	29,22
Jasa Kemasyarakatan	91.947	14,25
Lainnya	104.202	16,15
Jumlah	645.162	100

Sumber : (Kabupaten Tegal dalam angka.BPS 2019. Hal 25)

Keterangan :

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
2. Industri Pengolahan
3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel
4. Jasa Kemasyarakatan
5. Lainnya

Dari tabel IV.03 dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2019, jumlah tertinggi berada pada jenis pekerjaan perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel dengan jumlah 188.514 (29,22%) penduduk, sedangkan jumlah terendah berada pada jenis pekerjaan jasa kemasyarakatan dengan total 91.947 (14,25%) penduduk.

Tabel IV.04
Penduduk Kabupaten Tegal
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

Pendidikan Tertinggi	Jumlah	Persentase%
Tidak Sekolah	18.461	3,23
Sekolah Dasar	223.117	39,08
Sekolah Menengah Pertama	118.775	20,80
Sekolah Menengah Atas	155.245	27,19
Diploma I/II/III	13.343	2,34
Strata I/II/III	42.039	7,36
Jumlah	570.980	100

Sumber : (Kabupaten Tegal dalam angka.BPS 2019. Hal 38)

Dari tabel IV.04 dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018, jumlah tertinggi berada pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dengan total sebesar 223.117 (39,08%) penduduk sedangkan jumlah terendah berada pada jenjang Diploma I/II/II dengan total 13.343 (2,34%) penduduk.

Tabel IV.05

Persentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Tegal, 2019

	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Margasari	99,96	9	2	1	-	-
2	Bumijawa	99,98	1	1	-	-	-
3	Bojong	99,99	1	-	-	-	-
4	Balapulang	99,80	11	7	-	2	-
5	Pagerbarang	99,98	-	2	-	-	-
6	Lebaksiu	99,96	-	3	1	-	-
7	Jatinegara	100,00	-	-	-	-	-
8	Kedungbanteng	99,84	-	8	2	-	-
9	Pangkajene	99,64	18	17	-	-	-
10	Slawi	95,62	15	1	6	-	-
11	Dukuhwaru	99,86	2	7	2	3	-
12	Adiwerna	99,28	3	6	1	-	-
13	Dukuhturi	99,89	5	5	-	-	-
14	Talang	99,62	22	-	-	-	-
15	Tarub	99,95	3	-	-	2	-
16	Kramat	97,65	67	1	2	-	-
17	Suradadi	99,96	3	1	-	-	-
18	Warureja	99,89	9	2	-	-	-
	Jumlah	1.790.46	169	63	15	7	-

Sumber: (Kabupaten Tegal dalam angka.BPS 2019. Hal 49)

Dengan melihat tabel IV.05 diatas menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal sebagian besar menganut agama muslim/islam dengan jumlah keseluruhan mencapai 1.790.46 orang, dengan jumlah agama protestan 169 orang, agama katholik 63 orang , Hindu 15 orang dan Budha 7 orang..

Sehingga dapat dikatakan mayoritas masyarakatnya memiliki jiwa religius yang lumayan kental yang melekat pada setiap diri masyarakat. Dan membuat hubungan antar masyarakatnya menjadi lebih rukun ,akur, dan sejahtera antara

masyarakat satu dengan yang lain, walaupun terkadang masih ada sedikit perselisihan.

IV.I.3 Kondisi Pemerintahan Kabupaten Tegal

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintahan Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota yang dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu Gubernur atau Bupati/Walikota,

serta DPRD Provinsi maupun Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kabupaten Tegal sebagai Pemerintahan Daerah di tingkat Kabupaten juga menata organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Struktur organisasi di Kabupaten Tegal dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.06
Struktur Organisasi Kabupaten Tegal

NO.	NAMA PERANGKAT
I	BUPATI TEGAL
II	WAKIL BUPATI TEGAL
1.	<p>SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bagian Pemerintahan 2. Bagian Pemerintahan Desa 3. Bagian Hukum <p>Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bagian Perekonomian 2. Bagian Pembangunan 3. Bagian Layanan Pengadaan 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat <p>Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bagian Organisasi

	<p>2. Bagian Keuangan</p> <p>3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol</p> <p>4. Bagian Umum</p> <p>Staf Ahli</p>
2.	DPRD SEKRETARIAT
3.	<p>DINAS-DINAS DAERAH</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Sosial</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penduduk Penduduk Perempuan dan KB</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Perhubungan</p> <p>Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</p> <p>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p>

	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4.	INSPEKTORAT, DAN BADAN DAERAH Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Badan Pengelolaan Investasi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.	RSUD, KANTOR DAN LEMBAGA LAIN RSUD Dr.Soeselo RSUD Suradadi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Kecamatan

Sumber: http://utama.tegalkab.go.id/page/view/struktur_organisasi_20190306085735 diakses tanggal 13 januari 2021

IV.I.4 Sosial Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang telah diambil oleh pemerintah serta menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Besarnya suatu sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah dapat dilihat dari perannya dalam perekonomian daerah. Semakin besar distribusi nilai tambah suatu sektor

kepada perekonomian daerah, maka akan semakin besar juga peranannya dalam perekonomian daerah tersebut.

Tabel. IV. 07

Presentase Distribusi PDRB Kabupaten Tegal Tahun 2012-2016 (persen)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	Persentase%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,84	13,54	12,76	23,911
Pertambangan dan Penggalian	4,51	4,43	4,32	86,31
Industri Pengolahan	34,69	34,30	34,60	41,16
Pengelolaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,03	3,6
Konstruksi	7,51	7,70	7,78	44,9
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,11	15,25	15,47	35,64
Transportasi dan Pergudangan	2,71	2,75	2,82	21,02
Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	4,26	4,35	4,45	28,46
Informasi dan Komunikasi	2,68	2,86	2,97	22,76
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,30	2,25	11,95
Real Estate	1,60	1,62	1,60	4,14
Jasa Perusahaan	0,42	0,42	0,44	0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,18	2,12	2,08	9,61
Jasa Pendidikan	5,17	5,30	5,36	14,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,79	0,80	0,49
Jasa Lainnya	2,13	2,17	2,22	10,26
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : (Kabupaten Tegal Dalam Angka ,BPS,2019. Hal 62)

Berdasarkan tabel IV.07 di atas, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Tegal telah bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menuju lapangan usaha ekonomi lainnya terlihat dari

penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tegal. Sumbangan terbesar pada tahun 2019 dihasilkan oleh Industri Pengolahan, dalam lima tahun kedepan tidak mengalami naik turun . Pada tahun 2017 lapangan usaha tersebut berkontribusi sebesar 34,69 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 34,30 persen dan pada tahun 2019 sebesar 34,60 persen. Kontribusi terbesar kedua diberikan oleh lapangan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang cenderung fluktuatif dalam kurun waktu 2017 sampai 2019 tahun. Lapangan usaha Konstruksi berkontribusi sebesar 7,51 persen pada tahun 2017, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 7,70 persen, dan terus meningkat kontribusinya terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 7,78 persen.

IV.I.5 Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat di Kabupaten Tegal adalah pendukung kebudayaan Jawa. Sebagaimana seperti masyarakat pendukung kebudayaan Jawa lainnya, Mereka dalam berkomunikasi juga menggunakan bahasa Jawa. Akan tetapi, dengan dialek/dialog “Jawa-tegal” yang termasuk dalam kategori dialek “Banyumasan”. Dialognya yang khas menjadikan orang tegal sering disebut sebagai “Wong Ngapak”, Karena jika mengucapkan kata-kata tertentu, “bapak” misalnya, maka pengucapan huruf “k”-nya sangat kental (kentara). Hal ini berbeda dengan orang Jawa-Yogya dan Jawa-Solo yang pengucapan huruf “k”-nya “nyaris tak terdengar”.

Selain itu, ada juga yang menyebutnya sebagai “Jawa Kowek” dan “Jawa Reang”. Bisa jadi, sebutan yang terakhir sangat erat kaitannya dengan suara yang

relatif keras dan irama yang relatif cepat, sehingga memberi kesan berisik (reang). Hal ini berbeda dengan suara dan irama orang Jawa-Jogya dan Jawa-Solo yang relatif lembut dan lambat dalam bertutur dan atau bertegur sapa, sehingga terkesan teduh dan tidak berisik (halus). Oleh karena itu, masyarakat Tegal menyebut bahasa Jawa yang diucapkan oleh orang Yogya dan Solo adalah bandek, yaitu suatu istilah untuk bahasa Jawa yang halus.

Prinsip keturunan yang dianut oleh masyarakat Tegal adalah bilateral, yaitu suatu sistem penarikan garis keturunan melalui nenek-moyang laki-laki dan wanita secara serentak. Artinya, yang dianggap sebagai kerabatnya adalah kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sedangkan, istilah yang digunakan untuk menyebut atau menyapa kerabatnya antara lain: bapak (istilah untuk menyebut orang tua laki-laki), sima (istilah untuk menyebut orang tua perempuan), side lanang (istilah yang digunakan untuk menyebut orang tua laki-laki ayah dan ibu), side wadon (istilah yang digunakan untuk menyebut orang tua perempuan ayah dan ibu), lek atau paman (istilah yang digunakan untuk menyebut adik laki-laki ayah dan ibu), bibi (istilah yang digunakan untuk menyebut adik perempuan ayah dan ibu), kakang (istilah yang digunakan untuk menyebut saudara tua laki-laki), mbakyu (istilah yang digunakan untuk menyebut saudara tua perempuan), dan adi (istilah yang digunakan untuk menyebut saudara muda baik laki-laki maupun perempuan).

Sistem perkawinan yang mereka anut adalah “bebas”. Artinya, tidak hanya membatasi pada daerah sendiri (indogami-daerah), Tetapi juga membolehkan orang kawin dengan gadis atau jejaka dari daerah lain. Sedangkan, tempat tinggal

yang dianut setelah perkawinan adalah matriloal (pengantin baru tinggal di rumah orang tua atau dekat dengan kerabat pihak perempuan).

Di masa lalu seorang pengantin lelaki baru bekerja seperti sediakala ketika hari perkawinan sudah mencapai hari ketujuh. Selama itu Sang Pengantin hanya bersih-bersih halaman rumah (pagi dan sore hari). Namun, dewasa ini hal itu dapat dikatakan tidak dilakukan lagi karena pada umumnya setiap keluarga tidak mempunyai halaman yang cukup luas. Disamping itu, pepohonan-pepohonan besar dan rumpun-rumpun bambu telah banyak yang ditebangi dan berganti menjadi perumahan. Padahal, di tahun 60-an banyak rumah yang halamannya cukup luas.

Pada masa lalu orang-orang yang status sosialnya tinggi adalah yang memiliki harta benda yang berlimpah dan orang-orang yang pengetahuan agamanya (Islam) dalam/luas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di masa lalu banyak orang tua yang mengirim anaknya ke pesantren, seperti: Kaliwungu (Semarang), Kraprak (Yogyakarta), dan Lasem (Jawa Timur). Namun, dewasa ini yang termasuk dalam status sosial tinggi adalah tidak hanya orang-orang yang memiliki kekayaan dan pengetahuan agama saja, tetapi juga pendidikan formal yang tinggi. Ini artinya, orang-orang yang hanya memiliki kekayaan, pengetahuan agama, dan pendidikan formal yang sedang-sedang saja termasuk dalam status sosial sedang (menengah). Sedangkan, mereka yang tidak atau kurang mampu, baik dalam kekayaan, pengetahuan agama, dan pendidikan formal termasuk dalam status sosial yang rendah, seperti: tukang becak, tukang songgol, dan buruh tani. (pepeng).

Banyaknya lembaga keagamaan di wilayah Kabupaten Tegal dapat di jadikan parameter awal, bahwa masyarakat di wilayah Kabupaten Tegal bersifat Religius, santun dalam kata-kata dan bijak dalam sikap. Arus informasi sebagai dampak era globalisasi terbukti telah berhasil mendorong pada peningkatan kecerdasan masyarakat dari penindasan politis serta berhasil menyentuh rasa keingin tahuan yang tinggi.

Terdapat indikasi yang kuat bahwa tokoh masyarakat telah memiliki wawasan mandiri tentang suatu tema yang sedang menjadi topik kajian masyarakat. Para tokoh masyarakat sangat menghargai kepada upaya-upaya inovatif bagi perkembangan pembangunan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang Islami.

Kemudian mengenai kebudayaan maupun kesenian, di wilayah Kecamatan Margadana memiliki kebudayaan yang sampai sekarang ini masih di lestarikan di antaranya adalah :

1. Kuntulan, kesenian ini mulai dikenal masyarakat Tegal pada sekitar awal abad 20 yaitu pada saat di tanah air banyak muncul pergerakan kebangsaan. Tokoh-tokoh masyarakat Pemalang saat itu tak mau ketinggalan ikut dalam kancan perjuangan nasional. Dibentuklah perkumpulan bela diri, khususnya pencak silat. Kegiatan bela diri ini ketika itu selalu diiringi rebana dan pukulan bedug serta dikumandangkan pula doa-doa salawat Nabi sehingga terkesan sebagai kegiatan kesenian dan keagamaan.

Setelah kemerdekaan kegiatan ini yang kemudian di kenalkan dengannya nama kuntulan tetap berlangsung dan berubah dari alat perjuangan

menjadi sarana hiburan. Kesenian ini biasanya dipentaskan pada acara peringatan hari besar nasional, hajatan atau pun menyambut tamu resmi. Kesenian kuntulan tampak menarik karena memadukan jurus-jurus bela diri yang nampak artistik, demonstrasi akrobatik dan keindahan musik rebana dan bedug.

2. Kuda Lumping, pelatihan seni budaya tradisional tidak hanya menampilkan seni bela diri kuntulan saja, namun juga adanya penampilan kesenian kuda lumping. Kuda lumping ini dimainkan oleh orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah tim kuda lumping terdapat berbagai macam bagian pekerjaan yang harus dilakukan pemainnya. Misalnya pemain alat musik, penyair, pemain kuda lumping, pemain barong, serta pemain yang mengenakan riasan. Kesenian kuda lumping ini juga diiringi musik tradisional dengan syair bahasa Jawa kuno serta sholawat ataupun doa-doa. Jaran kepang atau Kuda Lumping adalah jenis kesenian tradisional yang umumnya dikenal di masyarakat Jawa Tengah. Kesenian ini merupakan jenis permainan yang menyertakan unsur magis karena pada adegan tertentu pemainnya memainkan atraksi yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa seperti adegan makan pecahan kaca.

Dari sejumlah kesenian Jaran Kepang yang ada di Jawa Tengah, tegal mungkin memiliki beberapa kelebihan berupa inovasi seperti adanya adegan cukup unik dimana dua atau tiga orang pemain dijadikan manusia setengah robot yang bisa duduk atau berdiri mematung berjam-jam lamanya. Kesenian Jaran Kepang

biasanya dipentaskan pada acara hajatan, upacara hari besar nasional atau pun menyambut kunjungan tamu resmi.

IV.I.6 Kondisi Kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Untuk itu disuatu kecamatan harus memiliki sarana dan prasarana seperti puskesmas dan puskesmas pembantu.

Puskesmas merupakan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain puskesmas mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Tabel IV.08

Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tegal, 2018

Kecamatan		Rumah Sakit				Puskesmas	Posyandu
		Pemerintah		Swasta			
		Jumlah	Tempat Tidur	Jumlah	Tempat Tidur		
010	Margasari	-	-	-	-	2	87
020	Bumijawa	-	-	-	-	1	102
030	Bojong	-	-	-	-	2	89
040	Balapulang	-	-	-	-	2	109
050	Pagerbarang	-	-	-	-	1	54
060	Lebaksiu	-	-	-	-	2	92
070	Jatinegara	-	-	-	-	1	92
080	Kedungbanteng	-	-	-	-	1	56
090	Pangkah	-	-	-	-	2	101
100	Slawi	1	507	1	32	1	70
110	Dukuhwaru	-	-	-	-	1	67
120	Adiwerna	-	-	1	198	2	118
130	Dukuhturi	1	49	-	-	2	98
140	Talang	-	-	-	-	2	78
150	Tarub	-	-	-	-	2	91
160	Kramat	-	-	2	201	2	89
170	Suradadi	1	113	-	-	2	82
180	Warureja	-	-	-	-	1	43
2017		3	669	4	431	29	1518
2018		3	566	4	458	29	1518
2019		3	506	4	380	29	1518

Sumber : (Kabupaten Tegal dalam angka.BPS 2019. Hal 67)

Dari Tabel IV.08 diatas menjelaskan bahwa Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini terlihat dari banyaknya sarana kesehatan maupun tenaga medis yang tersedia. Pada tahun 2019 jumlah rumah sakit sebanyak 9 buah yang terdiri dari 3 rumah sakit pemerintah dan 4 rumah sakit swasta. Jumlah puskesmas sebanyak 29 buah yang tersebar di seluruh kecamatan. Selain itu juga didukung oleh posyandu yang berjumlah cukup banyak yaitu 1.518 di seluruh Kabupaten Tegal.

IV.I.7 Sarana dan Prasarana di Kabupaten Tegal

Sarana dan Prasarana penunjang yang terdapat di Kabupaten Tegal, sebagai berikut :

Tabel: IV.09

Sarana yang terdapat di Kabupaten Tegal

Uraian	Jumlah	Keterangan
Mesin Ketik	49	Kurang baik
Meja	145	Baik
Kursi (aparap & pelayanan)	78	Baik
Almari arsip (dokumen)	5	Baik
Komputer dan printer	7	Baik
Mesin fax/ modem	3	Kurang Baik (Terbatas)
Kendaraan Dinas	3	Kurang Baik
Papan tulis	3	Baik
Papan Data/ Monografi	2	Baik
Brankas	2	Baik
Kipas Angin/ AC	6	Baik
Telephon Kantor	2	Baik
Televisi	2	Baik

(Sumber: Data Kabupaten Tegal Dalam Angka 2019)

Tabel diatas menunjukan bahwa keseluruhan sarana yang ada di Kantor Kabupaten Tegal sudah memadai namun beberapa ada yang kondisinya kurang baik seperti kendaraan dinas.

Tabel. IV.10

Prasarana yang terdapat di Kabupaten Tegal

Uraian	Jml	Keberadaan	Kondisi
Gedung Kantor	2	Ada	Baik
Ruangan Kerja	9	Ada	Baik
Pendopo/Tempat Rapat	1	Ada	Baik
Mushola	1	Ada	Baik
Puskesmas	2	Ada	Baik
Lahan Parkir	1	Ada	Baik
Penerangan Tempat	10	Ada	Baik

(Sumber: Data Kabupaten Tegal Dalam Angka 2019)

Tabel diatas menunjukan bahwa keseluruhan prasarana yang ada di kantor Kabupaten Tegal sudah baik serta memadai.

IV.II Deskripsi Wilayah Disdukcapil Kabupaten Tegal

IV.II.1 Letak Geografis Disdukcapil Kabupaten Tegal

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal yang beralamatkan di Jl. Ir. H. Juanda No.9A, Karangjungkeng, Pakembaran, Kec. Slawi, Tegal, Jawa Tengah 52415

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal melayani masyarakat dari 18 Kecamatan, yaitu Adiwerna, Balapulung, Bojong, Bumijawa Dukhturi, Dukuhwaru, Jatinegara, Kedungbanteng, Kramat, Lebaksiu, Margasari, Pagerbarang, Pangkah, Slawi, Suradadi, Talang, Tarub, Warurejo.

IV.II.2 Sejarah Kantor Disdukcapil Kabupaten Tegal

Sejarah Terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Sesuai Keputusan Mendagri No. 54 Tahun 1983 tanggal 27 Oktober 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten / Kota ditindaklanjuti Keputusan Bupati Kepala Daerah TK II Tegal No. 50/B/Kep/Bt/1988 tentang pembentukan Organisasi & Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kab. Daerah Tk. II Tegal. Awal nomenklatur Disdukcapil adalah "KANTOR CATATAN SIPIL" menjadi DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK" kemudian menjadi DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (berdasarkan Peraturandaerah No.16 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dan telah diubah dengan Perda NO. 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kemudian setelah itu keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Setelah dilakukan penilaian indikator dan kelas interval terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yaitu jumlah penduduk, jumlah kecamatan, jumlah kelurahan, jumlah rata-rata mobilitas penduduk per tahun dalam tiga tahun terakhir dan tingkat kepadatan penduduk,

maka struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mengalami perubahan. Struktur organisasi yang digunakan adalah tipe B Pola Maksimal yang terdiri dari Sekretariat (2 seksi), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (3 seksi), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil (3 seksi), dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (3 seksi). Hal ini berbeda dari struktur organisasi sebelumnya yaitu Sekretariat (3 seksi), Bidang Pelayanan Kependudukan (2 seksi), Bidang Pencatatan Sipil (3 seksi), dan Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan (2 seksi).

Dengan dicanangkan adanya System Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Pemerintah Kabupaten Tegal tentang pembuatan KTP berbasis NIK secara Nasional pada bulan Februari 2007, yang meliputi 18 Kecamatan yang berada di Kabupaten Tegal. Serta mengacu kepada Peraturan Bupati Tegal No 23 tahun 2014 yang merupakan satuan kerja pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kependudukan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Sedangkan tugas pokok pelaksanaannya melalui urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta kebijakan Bupati berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Visi

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera, Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, Cinta Budaya Tegal”

Misi :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responstf terhadap pemenuhan hak dasar rakyat;
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalua pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan industri dan pertanian
3. Mewujudkan kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama;
4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisionai;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerntah daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Jika dihubungkan dengan visi dan mist Bupati dan VVakil Bupati Tegal dimaksud, Dinas Kependudukan den Pencatatan Spil Kabupaten Tegal mendukung misi perlama yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat dengan menitikberatkan pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan yang

bersih serta professional dalam pelayanan public utamanya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

IV.II.3 Jumlah Pegawai Disdukcapil Kabupaten Tegal

Berikut jumlah pegawai Disdukcapil Kabupaten Tegal:

Tabel.IV.11

Jumlah Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Tegal

URAIAN	JUMLAH	Persentase %
Pegawai PNS	87	13,86
Pegawai PTT	14	8,62
JUMLAH	101	100 %

Sumber: Sekretariat Disdukcapil Kabupaten Tegal

Dari Tabel 11. DISDUKCAPIL Kabupaten Tegal Dalam melayani Masyarakat memiliki 87 pegawai PNS, dan 14 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap).

IV.II.4 Pendidikan pegawai Disdukcapil Kabupaten Tegal

Berikut pegawai Disdukcapil Kabupaten Tegal:

Tabel. IV.12
Pendidikan pegawai Disdukcapil Kabupaten Tegal

URAIAN MENURUT TINGKAT PENDIDIAN	JUMLAH	Persentase (%)
SEKOLAH DASAR	-	-
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	-	-
SEKOLAH MENENGAH KEATAS	-	-
DIPLOMA I	-	-
DIPLOMA II	-	-
DIPLOMA III	4	4,04
STRATA I	93	93,93
STRATA II	4	4,04
STRATA III	-	-
JUMLAH	101	100,00%

Sumber: *Sekretariat Disdukcapil Kabupaten Tegal 2019*

Dari Tabel 12. dapat diketahui pada tahun 2019 Jumlah anggota anggota Disdukcapil Kabupaten Tegal berjumlah 101 orang. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan tamat Strata II berjumlah 4 (4,04%) orang. Sedangkan untuk latar belakang tamat pendidikan Strata 1 berjumlah 93 (93,93%).

Tabel.IV.13

Jumlah Pegawai Disdukcspl kabupaten Tegal menurut jenis kelamin Tahun 2019

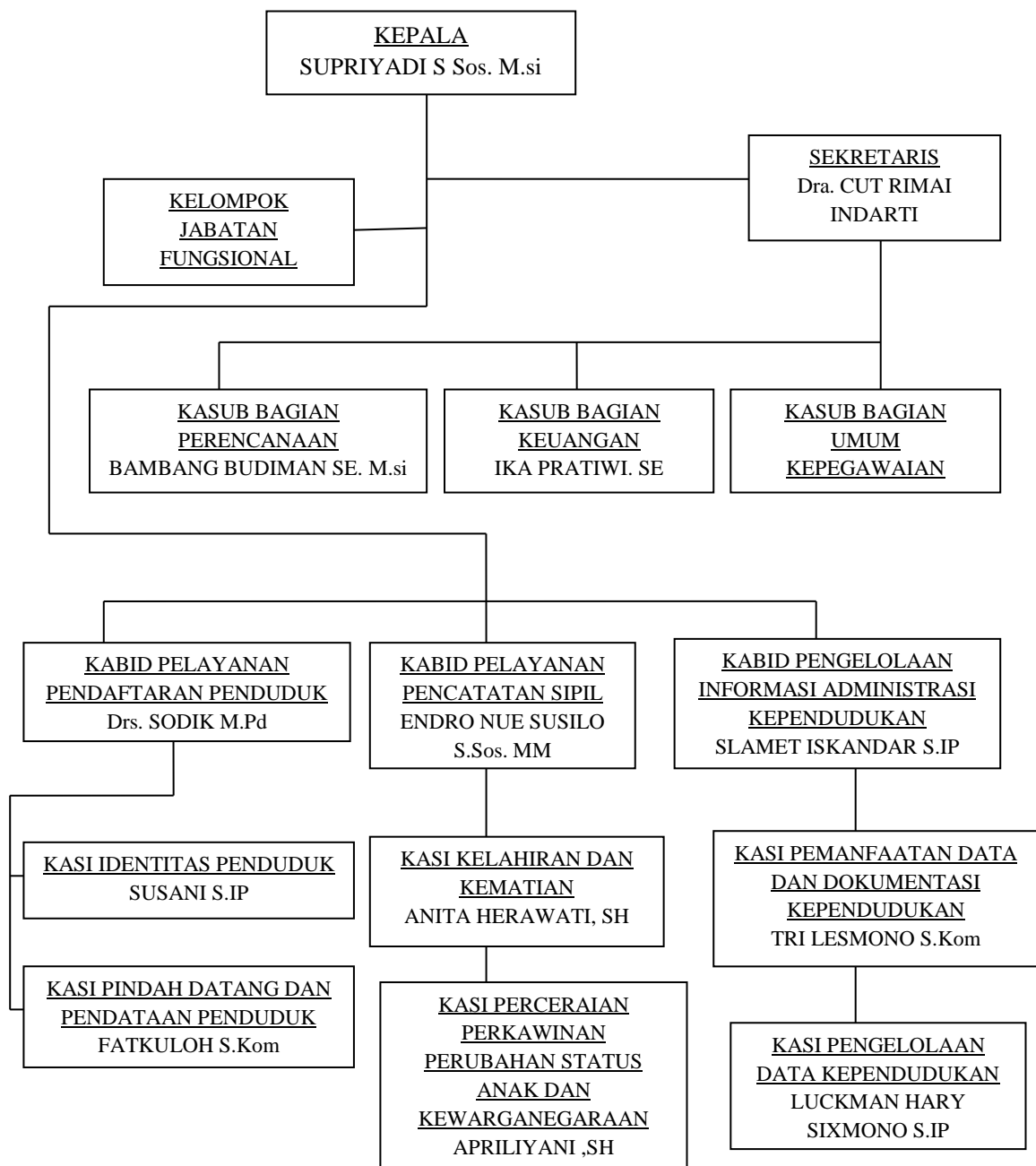
MENURUT JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE(%)
LAKI LAKI	75	100
PEREMPUAN	26	100
JUMLAH	101	100.00%

Dari Tabel 13. dapat diketahui pada tahun 2019 Jumlah umur menurut jenis kelamin di Disdukcapil Kabupaten Tegal dengan jumlah laki laki 75 orang dan jumlah perempuan 26 orang, jadi jumlah pegawai paling banyak yaitu pegawai laki laki dengan jumlah 75 orang ketimbang dengan jumlah perempuan.

IV.II.5 Struktur Organisasi Disdukcapil Kabupaten Tegal

Bagan IV.01

Struktur Organisasi Dan Jabatan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal



Sumber :Foto Monografi Disdukcapil Kabupaten Tegal , diambil foto pada tanggal 20 oktober 2020

IV.II.6 Tugas Pokok Dan Fungsi Disdukcapil Kabupaten Tegal

Berdasarkan kewenangan tersebut, tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Inspektorat Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

Fungsi :

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan / ketatausahaan Dinas;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan draf rencana

kerja, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan / ketatausahaan;
- b. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- e. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- g. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

3. Kepala Subbagian Perencanaan

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan Dinas;
- c. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- e. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;

4. Kepala Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan Dinas;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;

6. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;

- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

7. Kepala Seksi Identitas Penduduk

Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai fungsi

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk yang meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- d. Pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;

- e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;

8. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah datang dan pelaksanaan pendataan penduduk;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah datang dan pelaksanaan pendataan penduduk;
- c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
- d. Pelaksanaan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
- e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;

9. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil.
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil.

10. Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian

Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian ;
- b. penyiapan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pencatatan kelahiran dan kematian ;

- c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian ;
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian:
- e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian;
- f. penyiapan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian.

11. Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status anak dan Pewarganegaraan

Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status anak dan Pewarganegaraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status anak dan Pewarganegaraan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan perubahan status kewarganegaraan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan perubahan status kewarganegaraan;

- c. pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan perubahan status kewarganegaraan;
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan;
- e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan;
- f. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status anak dan Kewarganegaraan.

12. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Kepala Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi ;

- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi ;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

13. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi

informasi dan komunikasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sistem informasi administrasi kependudukan dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

14. Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan

Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi pengolahan dan penyajian data kependudukan;

- b. Penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- c. Penyiapan dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

15. Kepala Bidang Pemanfaatan data dan inovasi Pelayanan

Kepala Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

- e. Pelaksanaan kerjasama sama administrasi kependudukan ;
- f. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

16. Kepala Seksi kerjasama dan inovasi pelayanan

Kepala Seksi kerjasama dan inovasi pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- c. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- d. penyiapan bahan pembinaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
- e. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

17. Kepala Seksi Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

Kepala Seksi Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Seksi Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan koordinasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ;
- b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ;
- c. penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ;
- e. penyiapan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

18. Kelompok jabatan fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul Implementasi program e-KTP UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil DISDUKCAPIL Kabupaten Tegal. Peneliti memilih informan tidak pada besaran tetapi kedalaman informasi yang didapatkan dengan memilih orang-orang yang mengetahui bagaimana permasalahan yang ada dalam penelitian, hal ini agar tingkat kepercayaan dan validitas dari penelitian ini memiliki kepercayaan bagi pembaca.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana implementasi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang program e-KTP yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam mewujudkan tertib administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. dan untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung, penghambat, dan solusi mekanisme pelaksanaan e-KTP dalam mewujudkan tertib administrasi di Kabupaten Tegal. Pokok Penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah dengan indikator sebagai berikut;

3. Implementasi, secara umum dapat di ukur dari indikator :

- e. Komunikasi
- f. Sumberdaya
- g. Disposisi

h. Struktur birokrasi

4. Program e-KTP, secara umum dapat di ukur dari indikator :

f. Mobilisasi Penduduk

g. Perekaman e-KTP

h. Pencetakan e-KTP

i. Penerbitan e-KTP

j. Sarana Prasarana Penunjang e-KTP.

Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan IMPLEMENTASI PROGRAM E-KTP BERDASARKAN UU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DISDUKCAPIL KABUPATEN TEGAL yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dalam mewujudkan Tertib administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. dan untuk mengetahui faktor penghambat dan solusi terkait pelaksanaan e-KTP dalam mewujudkan tertib administrasi di Kabupaten Tegal. Adapun informan mencakup :

3. Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 3 orang

a. Ibu Susani,S,IP

b. Ibu Astidar,SE

c. Endro Nue Susilo S.Sos. MM

4. Masyarakat 3 orang

- a. Bapak Cahyono
- b. Bapak Torikun
- c. Ibu siti aisyah

V.1. Hasil Penelitian

1. Implementasi

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah petugas sudah menyampaikan terkait informasi atau syarat pembuatan e-KTP?

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“Terkait informasi syarat pembuatan e-Ktp kami selalu sampaikan mas kepada masyarakat dan kan syarat tersebut juga tertera dalam papan informasi mas, jadi masyarakat bisa melihat sendiri.”

Menurut Ibu Sussani, S,IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“Untuk petugas loket memang harus menyampaikan informasi apapun yang masyarakat butuhkan dalam pelayanan kependudukan ini mas”

Menurut Bapak Cahyono (selaku masyarakat penerima pelayanan) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

”Untuk informasi terkait syarat-syarat pelayanan e-KTP memang petugas disdukcapil sudah memberikan mas, cuman untuk informasi kejelas mengenai kapan jadinya atau diterbitkannya e-KTP belum jelas mas, jadi kita masyarakat harus sering bolak-balik kekecamatan untuk memastikan jadinya e-KTP kita.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa petugas pelayanan e-KTP Disdukcapil sudah memberikan kejelasan informasi terkait syarat pembuatan e-KTP, namun untuk kejelasan kapan diterbitkannya e-KTP belum baik, hal ini menyebabkan masyarakat harus menunggu lama dan sering bolak-balik ke kantor hanya untuk memastikan kapan e-KTP mereka diterbitkan.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah petugas sudah memberikan informasi dengan jelas ?

Menurut Ibu Sussani, S,IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“Sejauh ini sangat jelas informasi dari petugas loket.”

Menurut Ibu Astidar, SE. (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Sudah jelas mas, informasi juga kan ada di papan informasi yang bisa dilihat masyarakat sendiri.”

Menurut Bapak Cahyono (selaku masyarakat penerima pelayanan) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

”Menurut saya sudah sangat jelas mas. Petugas juga cukup ramah dalam memberikan informasi”

Menurut Bapak Slamet Torikun (selaku masyarakat penerima pelayanan) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

”Cukup jelas mas, cara berkomunikasi petugas juga cukup baik”

Berdasarkan wawancara dengan 4 informan maka dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh petugas Disdukcapil dalam memberikan informasi sudah jelas dan dapat dipahami masyarakat, cara berkomunikasi petugas juga cukup ramah.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Bapak/Ibu/Sdr Bagaimana bila ada kesalahpahaman, apakah petugas langsung memberikan solusi?

Menurut Ibu Astidar,SE. (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

”Tentu saja mas, bila ada salah paham atau miskomunikasi terkait informasi yang diberikan petugas Disdukcapil akan memberikan solusi agar masyarakat tetap merasa nyaman dengan pelayan kependudukan disini mas.”

Menurut Ibu Sussani,S,IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

”Pastinya diberikan solusi mas, agar masyarakat tidak merasa disepelkan dalam pelayanan ini.”

Menurut Bapak Torikun (selaku masyarakat penerima pelayanan) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

”Sejauh ini sih tidak ada kesalahpahaman antara saya dan disdukcapil mas, mereka cukup jelas ko dalam memberikan informasi terkait pelayanan e-KTP ini.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa mengenai bilamana ada kesalahpahaman masyarakat langsung di berikan solusi demi kenyamanan masyarakat.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Apakah tanggapan Bapak/Ibu/Sdr petugas Disdukcapil sudah memberikan informasi dengan baik?

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (selaku Kepala Dinas dan Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“menurut saya sih sudah ya mas, karena semua petugas disini berusaha memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat”

Menurut Ibu Sussani, S,IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“sudah yah mas, karena disini juga untuk pemberian informasi sudah terpasang jelas di papan informasi , kita juga menggunakan sistem online disitu masyarakat bisa melihat informasi semua tentang Disdukcapil mulai dari pemberian informasi persyaratan pembuatan e-KTP, daftar antrian online, pembuatan KK dan lain sebagainya yang berhubungan dengan data penduduk”

Menurut Ibu siti Aisyah (selaku masyarakat penerima pelayanan) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“sejauh ini sih menurut saya sudah jelas mas , bisa dilihat di papan informasi juga bisa dilihat di media online”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa petugas Disdukcapil dalam pemberian informasi sudah cukup baik , bisa dilihat di papan informasi , juga bisa dilihat di media online, dari pemberian informasi pembuatan e-KTP, pembuatan KK dan daftar antrian online , serta pemberian informasi lainnya.

Dari keempat pertanyaan diatas mengenai Komunikasi dapat disimpulkan bahwa petugas pelayanan e-KTP Disdukcapil sudah memberikan kejelasan informasi terkait syarat pembuatan e-KTP, dan untuk pemberian informasi juga sudah bisa dilihat di papan informasi dan media online, namun untuk kejelasan kapan diterbitkannya e-KTP belum baik, hal ini menyebabkan masyarakat harus menunggu lama dan sering bolak-balik ke kantor hanya untuk memastikan kapan e-KTP mereka diterbitkan dan bilamana ada kesalahpahaman disdukcapil segera memberikan solusi kepada masyarakat agar tidak ada lagi kesalahpahaman.

b. Sumber daya

Sumberdaya merujuk pada setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun finansial. Sumberdaya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah

program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan pemerintah

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah jumlah petugas Disdukcapil cukup memadai untuk melaksanakan e-KTP?

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“Sejauh ini jumlah petugas sudah cukup memadai untuk proses pembuatan e-KTP, namun dengan membludaknya jumlah masyarakat yang membuat e-KTP ini membuat petugas sedikit kewalahan, tapi alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan dengan baik tanpa ada hal hal yang merugikan”

Menurut Ibu Sussani,S,IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

” Saya kira sih sudah cukup yah mas para petugas juga sudah berusaha bekerja lebih ekstra bilamana dalam pembuatan e-KTP itu meembludak banyak”

Menurut Bapak Torikun (selaku masyarakat penerima pelayanan) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“ saya kira sih sudah cukup baik mas, karena disini kita juga diberi pelayanan yg baik baik dari petugas maupun pegawai yg ada disini, dan mereka juga saya lihat kerjanya bener bener serius ”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa untuk jumlah petugas Disdukcapil sudah cukup, dan bilamana terjadi suatu membludaknya jumlah masyarakat yang membuat e-KTP ini membuat petugas sedikit kewalahan, tapi sejauh ini sudah berjalan dengan baik tanpa ada hal hal yang merugikan.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah petugas Didukcapil memiliki kemampuan/ketrampilan yang mampu melaksanakan program e-KTP sesuai dengan yang diharapkan?

Menurut Ibu Sussani, S,IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“Yang saya lihat sejauh ini petugas yang bertugas baik di Disdukcapil Maupun dilapangan memiliki kemampuan cakap berbicara, dan actionnya menurut saya jelas mas. Saya rasa petugas yang bertugas sudah terbiasa menghadapi masyarakat yang ada di Kabupaten Tegal, sehingga para petugas lebih santai dalam proses tersebut”

Menurut Bapak Cahyono (selaku masyarakat penerima pelayanan)) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“Menurut saya mas, petugas yang bertugas disini perlu diberikan apresiasi karena mampu membeikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat”

Menurut Ibu Siti Aisyah (selaku masyarakat penerima pelayanan) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“petugas sudah menjalankan kewajiban yang baik mas, tentunya dengan kemampuan mereka yang sudah berpengalaman”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa petugas Disdukcapil dalam Didukcapil memiliki kemampuan/ketrampilan yang mampu melaksanakan program e-KTP sesuai dengan yang diharapkan, baik dari segi bicara dan actionya serta sudah memiliki petugas yang berpengalaman mengenai pembuatan e-KTP.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah jumlah petugas berpengaruh pada proses pelaksanaan e-KTP tersebut?

Endro Nue Susilo S.Sos.MM (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

"Sangat berpengaruh sekali toh mas, apabila jumlah petugas sedikit kan repot"

Menurut Ibu Astidar, SE.(selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

"Menurut saya sangat berpengaruh mas, karena apabila jumlah petugas sedikit, mereka akan kewalahan menghadapi kita pembuatan e-KTP jumlahnya banyak"

Menurut Ibu Sussani,S,IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

"Jumlah petugas sangat berpengaruh, lha wong jumlah pembuatan e-KTP saja banyak sekali kok, makanya kita butuh kan petugas yang memadai agar tidak keteteran"

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap proses pelayanan pembuatan e-KTP tersebut, apabila jumlah petugas sedikit, mereka akan kewalahan menghadapi masyarakat ketika pembuatan e-KTP yang jumlahnya banyak.

Dari kelima pertanyaan diatas mengenai Sumber daya dapat disimpulkan bahwa untuk jumlah petugas Disdukcapil sudah cukup, dan bilamana terjadi suatu membludaknya jumlah

masyarakat yang membuat e-KTP ini membuat petugas sedikit kewalahan, tapi sejauh ini sudah berjalan dengan baik tanpa ada hal hal yang merugikan dan Disdukcapil juga mampu memiliki kemampuan/ketrampilan yang mampu melaksanakan program e-KTP sesuai dengan yang diharapkan, baik dari segi bicara dan actionya serta sudah memiliki petugas yang berpengalaman mengenai pembuatan e-KTP.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah.

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr bagaimana sikap warga masyarakat Mengenai Pelaksanaan e-KTP?

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“warga masyarakat sangat antusias kok mas mengenai pelaksanaan e-KTP , meskipun kadang agak lama prosesnya

namun petugas benar benar berusaha memberikan pelayanan yg terbaik”

Menurut Ibu Astidar,SE. (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan :

“untuk sikap masyarakat sih ya mas kadang ada juga yang kesal karena bolak balik ke disdukcapil itu karena masyarakat ada kekurangan dalam persyaratan membuat e-KTP”

Menurut Bapak Cahyono (selaku Masyarakat penerima pelayanan) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan :

“menurut saya mas terkait pelaksanaan e-KTP ini yg saya alami itu saat mengatri mas, lama bnget, tapi saya lihat petugas disdukcapil sangat bekerja keras kok mas dalam melakukan pelayanan e-KTP”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat mengenai pelaksanaan e-KTP sudah cukup baik, disdukcapil juga berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Bagaimana sikap petugas Disdukcapil dalam pelaksanaan e-KTP?

Menurut Ibu Astidar,SE. (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

” Dalam memberikan pelayanan kami disini benar benar melakukan yang terbaik mas untuk masayaraktnya, meskipun kadang kewalahaan jika masyatakat yang membuat e-KTP, namun kita disini berusaha meberikan pelayanan yg baik buat masyarakatnya”

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 3 Februari 2021 mengatakan:

“Disdukcapil saya kira sangat baik yah mas, selain harus bisa memberikan pelayanan yg terbaik , kita juga di haruskan untuk memberikan pelayanan yg benar benar baik “

Menurut Ibu Sussani, SH.(Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Februari 2021 mengatakan:

"Yang saya lihat sih dari komunikasi terhadap masyarakat cara memberikan pelayanan , saya kira sih sudah cukup baik mas"

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa sikap petugas Disdukcapil dalam melakukan pelayanan e-KTP sudah baik.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan Menurut Bapak/Ibu/Sdr Bagaimana sikap petugas Disdukcapil bila ada masyarakat yang mengeluh mengenai pembuatan e-KTP?

Menurut Ibu Susani, S.IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Februari 2021 mengatakan:

“Sikap aparaturnya sudah cukup bagus kok mas baik dari cara penyampaian sesuai tugas pokok dan fungsinya sudah dipahami setiap aturan yang sudah di terapkan”

Menurut Ibu Astidar,SE (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Februari 2021 mengatakan:

“sejauh ini sih sudah baik mas, karena setiap ada masyarakat yang mengeluh mengenai pembuatan e-KTP kami selaku petugas Disdukcapil segera memberikan solusi kepada masyarakat tanpa ada yg dirugikan”

Menurut Ibu Siti Aisyah.(selaku masyarakat penerima pelayanan) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“untuk sikap petugas kepada masyarakat sih saya kira sudah lumayan baik mas”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa Sikap aparaturnya pelaksana sudah cukup baik dari cara penyampaian sesuai tugas pokok dan fungsinya sudah dipahami setiap aturan yang sudah diterapkan, dan jika ada keluhan dari masyarakat, petugas akan segera memberikan solusinya.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr apakah petugas berperan aktif dalam pelaksanaan KTP?

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

”jelas mas, karena didalam peranya petugas sudah memberikan peran yang aktif kepada masyarakatnya”

Menurut Bapak Cahyono.(selaku masyarakat penerima pelayanan) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“menurut saya sih sudah mas, kalopun ada kendala mengenai masyarakat, petugas akan memberikan solusi kepada masyarakatnya”

Menurut Ibu Sussani, SH.(Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“ disdukcapil selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kok mas “

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil sudah dalam memberikan pelayanan sudah baik , kalupun ada kendala pasti akan segera memberikan solusinya.

Dari keempat pertanyaan diatas bahwa warga masyarakat sangat antusias mengenai pelaksanaan e-KTP , meskipun kadang agak lama prosesnya namun petugas benar benar berusaha memberikan pelayanan yg terbaik, meskipun terkadang kewalahan namun petugas disdukcapil berusaha bekerja semaksimal mungkin dan untuk Sikap aparatur pelaksana sudah cukup bagus, baik dari cara penyampaian sesuai tugas pokok dan fungsinya sudah dipahami setiap aturan yang sudah di terapkan ”

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel..

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apakah prosedur pelayanan e-KTP selama ini sudah fleksibel dan mampu memberikan pelayanan dengan baik?

Menurut Ibu Sussani, S.IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan:

“Sangat fleksibel dan tidak ribet mas, kalo masyarakat mengetahui alurnya yaa pasti pelayanan akan berjalan baik dan cepat.”

Menurut Ibu Astidar, SE.(Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Febuari 2021 mengatakan:

“Baik mas, SOP pelayanan e-KTP sebetulnya bisa berjalan cepat kalo tidak ada kendala-kendala mas.”

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 3 Febuari 2021 mengatakan;

“Untuk SOP kita mengacu pada aturannya mas, dalam aturan kan jelas SOP nya jadi masyarakat petugas tinggal menyesuaikan SOP nya saja, tidak rumit ko mas kalo masyarakat benar-bener paham. Makanya selalu kita pajang di papan informasi terkait alur pelayanannya mas.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam pelayanan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Tegal sudah sangat fleksibel dan tidak rumit, hal ini tentu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan e-KTP, selain itu alur pelayanan yang terpajang dalam papan informasi

disdukcapil sangat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan e-KTP.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Bagaimana tindak lanjut ketika ada keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan e-KTP?

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

“jika ada keluhan dari masyarakat kami akan segera memberikan solusi tanpa ada yang dirugikan mas”

Menurut Ibu Sussani, S.IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“untuk solusi jika ada keluhan dari masyarakat kami selaku petugas Disdukcapil akan segera mengajukan laporan ke bagian terkait masalah apa yang masyarakat keluhkan, lalu menindaklanjuti dan memberikan solusinya”

Menurut Ibu Astidar, SE.(Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“ Paling keluhan dari masyarakat itu terkait dengan jaringan terus masyarakat sering bolak balik ke disdukcapil mas, sebenarnya keluhan itu kesalahan masyarakat juga yang kurang memperhatikan persyaratan pembuatan e-KTP, terus merasa antrianya lama, ya itu saja mas keluhan masyarakat, juga mengenai blangko, itu karena keterlambatan dari pemerintah pusat yg sering lambat memberikan blangkonya mas, kalo solusinya ya paling disini segera melapor ke pemerintah pusat untuk menindaklanjuti permasalahan ini”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa disdukcapil terkait dengan solusi dari keluhan

masyarakat, disdukcapil akan segera melapor dan menindaklanjuti permasalahan lalu memberikan solusi tanpa ada yg dirugikan.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apa kendala yang sering dihadapi terkait dengan pelaksanaan e-KTP dan bagaimana solusi yang dilakukan oleh Disdukcapil?

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Paling keluhan dari masyarakat itu terkait dengan jaringan terus masyarakat sering bolak balik ke disdukcapil mas, sebenarnya keluhan itu kesalahan masyarakat juga yang kurang memperhatikan persyaratan pembuatan e-KTP, terus merasa antrianya lama, ya itu saja mas keluhan masyarakat, juga mengenai blangko, itu karena keterlambatan dari pemerintah pusat yg sering lambat memberikan blangkonya mas, kalo solusinya ya paling disini segera melapor ke pemerintah pusat ”

Menurut Ibu Astidar, SE.(Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

“kendalanya ya itu mas, pertama jaringan yang sering eror kedua distribusi blangko yang sering terlambat, dan untuk solusinya kami akan segera melapor ke pemerintah pusat terkait dengan dsitribusi blangko ditambah dan di percepat, karna untuk distribusi blangko sendiri itu kewenangan dari pemerintah pusat, bukan dari disdukcapil mas”

Menurut Ibu Sussani, S.IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

“Kalo untuk kendala mengenai perekaman e-KTP sih seringnya pada teknisnya sih mas, alatnya kadang ngadat, atau problem, cuman itu bisa ditangani langsung karena kita

juga sebelumnya dibekali bimbingan teknis untuk penggunaan alatnya mas, jadi tidak ada kendala yang berarti, lancar aja”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pembuatan eKtp ada dua yaitu kendala teknis dan kendala jaringan, kendala teknis sendiri itu kendala yang berhubungan dengan terkendalanya alat untuk melakukan perekaman, yang menjadikan proses perekaman terhambat, kendala ini bukan kendala besar dan dapat langsung ditangani oleh petugas. Kemudian kendala jaringan itu ketika jaringan online atau internet yang menghubungkan kedatabase terganggu atau error, sehingga proses pengiriman data untuk verifikasi terhambat yang mengakibatkan lamanya proses perekaman.

Dari kelima pertanyaan diatas mengenai struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Tegal dalam memberikan pelayanan e-KTP kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang berdasarkan aturan. Prosedur dalam pelaksanaannya sudah fleksibel dan tidak rumit sehingga petugas dapat memberikan pelayanan e-KTP yang maksimal untuk masyarakat, Disdukcapil juga mau menerima keluhan dari masyarakat terkait pelayanan e-KTP dan akan langsung mengkonfirmasi untuk segera diberikan solusi, keluhan lebih banyak pada kendala jaringan dan kurangnya ketersediaan blangko yang membuat proses penerbitan e-KTP menjadi lebih lama.

Berdasarkan kesimpulan dari 4 indikator diatas maka peneliti simpulkan lagi bahwa untuk unit analisis, 1) Komunikasi, diketahui bahwa petugas pelayanan e-KTP Disdukcapil sudah memberikan kejelasan informasi terkait syarat pembuatan e-KTP, dan untuk pemberian informasi juga sudah bisa dilihat di papan informasi dan media online, namun untuk kejelasan kapan diterbitkannya e-KTP belum baik, hal ini menyebabkan masyarakat harus menunggu lama dan sering bolak-balik ke kantor hanya untuk memastikan kapan e-KTP mereka diterbitkan dan bilamana ada kesalahpahaman disdukcapil segera memberikan solusi kepada masyarakat agar tidak ada lagi kesalahpahaman.

Unit analisis, 2) Sumber daya diketahui bahwa untuk jumlah petugas Disdukcapil sudah cukup, dan bilamana terjadi suatu membludaknya jumlah masyarakat yang membuat e-KTP ini membuat petugas sedikit kewalahan, tapi sejauh ini sudah berjalan dengan baik tanpa ada hal hal yang merugikan dan Disdukcapil juga mampu memiliki kemampuan/ketrampilan yang mampu melaksanakan program e-KTP sesuai dengan yang diharapkan, baik dari segi bicara dan actionya serta sudah memiliki petugas yang berpengalaman mengenai pembuatan e-KTP.

Unit analisis, 3) Disposisi, diketahui bahwa Sikap aparaturnya pelaksana sudah cukup bagus, baik dari cara penyampaian sesuai tugas pokok dan fungsinya sudah dipahami setiap aturan yang sudah diterapkan dan warga masyarakat sangat antusias mengenai pelaksanaan e-KTP , meskipun kadang agak lama prosesnya namun petugas benar benar berusaha

memberikan pelayanan yg terbaik, meskipun terkadang kewalahan namun petugas disdukcapil berusaha bekerja semaksimal mungkin.

Unit analisis, 4) struktur birokrasi diketahui bahwa Disdukcapil Kabupaten Tegal dalam memberikan pelayanan e-KTP kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang berdasarkan aturan. Prosedur dalam pelaksanaannya sudah fleksibel dan tidak rumit sehingga petugas dapat memberikan pelayanan e-KTP yang maksimal untuk masyarakat, Disdukcapil juga mau menerima keluhan dari masyarakat terkait pelayanan e-KTP dan akan langsung mengkonfirmasi untuk segera diberikan solusi, keluhan lebih banyak pada kendala jaringan dan kurangnya ketersediaan blangko yang membuat proses penerbitan e-KTP menjadi lebih lama.

Dari poin diatas diperoleh fakta bahwa implementasi Program e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Tegal pada prakteknya memang sudah dengan cukup baik, hal ini bisa dilihat komunikasi petugas dengan masyarakat yang baik dan ramah, hal ini didukung dari sumberdaya manusia di Disdukcapil yang sangat kompeten dan memiliki kemampuan yang memadai. namun ada kendala terkait kejelasan kapan diterbitkannya e-KTP belum baik, hal ini menyebabkan masyarakat harus menunggu lama dan sering bolak-balik ke kantor hanya untuk memastikan kapan e-KTP mereka diterbitkan.

2. Program e-KTP secara umum dapat di ukur dari indikator:

a. Mobilisasi Penduduk

Mobilisasi penduduk adalah gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah (geografis) ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu

Mobilitas penduduk dapat dilihat dalam arti fisik, yaitu perpindahan penduduk untuk memperoleh peluang dan kesempatan yang lebih luas di tempat lain

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Bagaimana mekanisme dalam mobilisasi penduduk?

Menurut Ibu Susani,S,IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Kalau mobilisasi penduduk itu mekanismenya pertama kita daftar dulu wajib e KTP yang ada di Kabupaten Tegal, Setelah kita buat surat panggilan untuk wajib e-Ktp tersebut, untuk distribusi surat panggilannya kita berkoordinasi dengan kecamatan, kemudian kecamatan melalui kelurahan yang akan membagikannya. Selanjutnya wajib e-Ktp harus hadir dengan membawa surat tersebut dan persyaratan lainnya di Kantor Disdukcapil ataupun Paten kecamatan untuk melakukan perekaman sesuai dengan jadwal yang tertera mas, itu agar tertib”

Menurut Ibu Astidar,SE (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

”untuk mekanismenya bisa langsung datang ke kantor dengan membawa surat pemanggilan mas, setelah itu wajib eKtp tersenbut akan dilakukan perekaman atau yang sudah melakukan perekaman berarti tinggal mengambil eKtp mas, itu langsung lewat kecamatan bisa.”

Menurut Bapak Ahmad (Staff Teknis Disdukcapil Kec Talang) pada tanggal 19 Januari 2021 mengatakan;

“Mekanismenya yaaa masyarakat yang sudah mendapatkan surat panggilan untuk melakukan perekaman wajib hadir di kantor dengan membawa surat dan data diri untuk melakukan perekaman, dan untuk masyarakat yang sebelumnya sudah melakukan perekaman akan diberi surat panggilan untuk mengambil eKtp nya.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme mobilisasi penduduk itu mekanismenya adalah pertama Disdukcapil maupun paten di kecamatan mendaftar dulu wajib e-KTP yang ada di Kabupaten Tegal, Setelah itu dibuakan surat panggilan untuk wajib e-KTP tersebut, untuk distribusi surat panggilannya Disdukcapil berkoordinasi dengan kecamatan, kemudian kecamatan melalui kelurahan yang akan membagikannya. Selanjutnya wajib e-KTP harus hadir dengan membawa surat tersebut dan persyaratan lainnya di Kantor Disdukcapil ataupun Paten kecamatan untuk melakukan perekaman sesuai dengan jadwal yang tertera, itu agar tertib. Kemudian wajib e-KTP datang ke Kantor Disdukcapil maupun UPT yang ada di kecamatan untuk melakukan perekaman sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat panggilan. Untuk yang sebelumnya sudah melakukan perekaman maka dipanggil untuk mengambil cetak e-KTP di kecamatan.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apa yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya dalam melakukan mobilisasi penduduk?

Menurut Ibu Susani, S, IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Untuk sekarang tidak ada kendala mengenai Mobilisasi Penduduk, kesadaran masyarakat khususnya wajib e-Ktp untuk datang ke Disdukcapil untuk mengurus e-Ktp sudah baik mas, selain itu kan kita juga ada inovasi antrian online mas, jadi masyarakat tidak perlu datang mengambil antrian dan menunggu, antrian bisa

diambil secara online dan masyarakat ketika datang akan langsung dilayani”

Menurut Ibu Astidar,SE (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

”Untuk mobilisasi penduduk sih lancar ko mas, selama ini tidak ada kendala.”

Menurut Ibu Sri Wahyuni (Staff Teknis Disdukcapil Kec Kramat) pada tanggal 19 Januari 2021 mengatakan;

“Yang saya tau tidak ada kendala mas, lancar mas, koordinasi dengan kecamatan juga baik untuk distribusi surat panggilan.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan mobilisasi penduduk yang dilakukan oleh Disdukcapil selama ini tidak kendala yang berarti. Kesadaran masyarakat yang sudah tinggi untuk datang memenuhi panggilan dan melakukan perekaman data e-KTP, masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi antrian online yang disediakan oleh disdukcapil sehingga ketika datang ke kantor tidak perlu lagi mengikuti antrian. Ini adalah salah satu inovasi yang membuktikan bahwa disdukcapil sudah memberikan pelayanan dengan cukup baik.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apakah kordinasi antar Disdukcapil dan Kecamatan beserta aparaturnya mengenai Mobilisasi penduduk yang diselenggarakan selama ini berjalan dengan baik?

Menurut Ibu Astidar,SE (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“selama ini koordinasi antar Disdukcapil dan Kecamatan baik mas, kita dengan pihak kecamatan rutin berkoordinasi dan cukup intens mas, dari pihak kecamatan juga cukup responsif terkait mobilisasi penduduk ini”

Menurut Ibu Susani,S,IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

“Berjalan baik ko mas, tidak ada masalah dengan kecamatan dan Disdukcapil”

Menurut Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

”Untuk koordinasi yang selama ini kita jalankan dengan kecamatan berjalan baik mas, pihak kecamatan juga sangat responsif dalam pendistribusian surat panggilan wajib e-Ktp”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh disdukcapil dengan kecamatan kaitannya dalam mobilisasi penduduk sudah berjalan dengan baik. Pihak kecamatan cukup responsif dalam berkoordinasi dengan disdukcapil untuk mendistribusikan surat panggilan wajib e-KTP.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apakah komunikasi antara Disdukcapil dan Kecamatan terjalin dengan intens dalam kaitannya dengan Mobilisasi Penduduk?

Menurut Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Komunikasi terjalin baik dan intens ko mas, setiap kali ada surat untuk wajib e-Ktp kami selau menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak kecamatan, hal ini tentunya penting sekali untuk menjaga hubungan baik dengan kecamatan mas, sehingga pendistribusian suratnya bisa lebih tertib.”

Menurut Ibu Susani,S,IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

“yaa baik mas, komunikasi kami dengan pihak kecamatan terjalin cukup intens dan rutin setiap ada distribusi surat kita selalu berkomunikasi dulu dengan pihak kecamatan”

Menurut Ibu Sri Wahyuni (Staff Teknis Disdukcapil di Kecamatan Keramat) pada tanggal 19 Januari 2021 mengatakan;

“Kami melihat kalo komunikasi terjalin baik mas, terlebih untuk distribusi surat undangan untuk masyarakat. Berjalan sangat baik”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh disdukcapil kaitannya dengan pelaksanaan mobilisasi penduduk terjalin baik dan intens, setiap kali ada surat untuk wajib e-Ktp Disdukcapil selalu menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak kecamatan, hal ini tentunya penting sekali untuk menjaga hubungan baik dengan kecamatan, sehingga pendistribusian suratnya bisa lebih tertib dan maksimal.

- 5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Bagaimana cara Disdukcapil Kabupaten Tegal melakukan koordinasi dengan kecamatan agar program e-KTP tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan?

Menurut Ibu Susani,S,IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

“Koordinasinya yaa dengan bekerja sama dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan mas, khususnya dalam

mobilisasi penduduk kita juga bekerja sama dengan kecamatan untuk mendistribusikan surat panggilan wajib e-Ktp. Selain itu juga kita sekarang menempatkan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di setiap kecamatan mas, itu untuk mendekatkan pelayanan kependudukan kepada masyarakat sehingga tidak perlu jauh-jauh di datang ke disdukcapil”

Menurut Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

“Kita berkoordinasi dengan saling bekerja sama mas untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat dan dekat dengan rakyat.”

Menurut Ibu Sri Wahyuni (Staff Teknis Disdukcapil di Kecamatan Keramat) pada tanggal 19 Januari 2021 mengatakan;

”Tentu saja dengan menyatukan visi khususnya dalam mendekatkan pelayanan kependudukan mas, karena kecamatan kan garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Disdukcapil dengan kecamatan dilakukan dengan cara saling bekerja sama dan menyatukan visi untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih profesional dan dekat dengan masyarakat. Koordinasinya adalah terkait distribusi surat pemanggilan wajib e-KTP dan penempatan Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil di setiap kecamatan.

Dari kelima pertanyaan diatas mengenai mobilisasi penduduk dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mobilisasi penduduk dilaksanakan melalui koordinasi dengan kecamatan. mekanismenya dengan mendistribusikan surat pemanggilan wajib e-KTP melalui kecamatan,

kemudian wajib e-KTP datang ke kantor Disdukcapil atau UPT Disdukcapil yang ada di kecamatan untuk melakukan perekaman berdasarkan jadwal yang tertera, ini untuk menghindari antrian panjang. Penduduk yang datang dengan surat pemanggilan akan lebih didahulukan dalam pelayanan. Sejauh ini koordinasi terkait distribusi surat pemanggilan yang dilakukan disdukcapil dengan kecamatan berjalan dengan baik dan komunikasinya juga sangat intens.

b. Perekaman e-KTP

Perekaman e-KTP adalah proses memverifikasi data kependudukan oleh petugas kepada masyarakat dalam bentuk data ke fisik e-KTP.

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Bagaimanakah mekanisme Perekaman e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Tegal?

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Untuk mekanisme perekaman e-KTP masyarakat datang dengan membawa persyaratan, ke kantor Disdukcapil. Untuk masyarakat yang mendapatkan surat panggilan akan lebih di dahulukan ketimbang yang datang sendiri. Setelah itu dilakukan perekaman diawali dengan rekam sidik jari, iris mata, tanda tangan digitas, pas foto dan rekam biodata diri. Kemudian data hasil rekaman atau data biometrik di kirim kepusat untuk di validitasi dan verivikasi sebelum masuk status siap cetak”

Menurut Ibu Susani,S,IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

”yang pertama masyarakat datang mas ke kantor paten kecamatan atau bisa langsung ke Disdukcapil. Untuk masyarakat yang membawa surat panggilan akan didahulukan mas, setelah itu baru dilakukan perekaman dan data perekaman tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah statusnya siap cetak baru akan kita cetak mas.”

Menurut Ibu Astidar,SE (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Perekaman bisa dilakukan di Kecamatan atau di Kantor Disdukcapil langsung juga bisa, pertama masyarakat datang dengan membawa persyaratan dan surat panggilan bagi yang mendapatkan. Tapi untuk yang mendapatkan surat panggilan harus datang sesuai jadwal yang tertera mas, biar antriannya tertib. Setelah itu baru kita lakukan perekaman, mulai dari sidik jari, iris mata, foto, tanda tangan dan lainnya, kemudian data yang sudah direkam akan di tunggalkan dulu, biar data setiap penduduk itu tunggal di database. Setelah itu baru siap cetak”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme perekaman e-KTP itu masyarakat datang ke kantor Disdukcapil atau UPT yang ada dikecamatan dengan membawa persyaratan, untuk masyarakat yang memiliki surat panggilan akan didahulukan dalam pelayanan. Perekaman dimulai dari rekam sidik jari, rekam iris mata, tanda tangan digital, rekam pas foto, dan biodata diri. Kemudian data biometrik hasil perekaman akan dikirim ke pusat untuk dilakukan verifikasi dan penunggalan data. Setelah proses verifikasi baru akan masuk status siap cetak.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apakah syarat-syarat perekaman e-KTP yang diberikan di Disdukcapil sudah dianggap jelas?

Menurut Ibu Sri Wahyuni (Staff Teknis Disdukcapil di Kecamatan Kramat) pada tanggal 19 Januari 2021 mengatakan;

“Untuk persyaratan saya kira sudah jelas mas, terpampang jelas di papan informasi di setiap kecamatan dan dikelurahan juga setiap ada yang mengajukan e-Ktp selau diberi pengarahan tentang apa saja persyaratannya”

Menurut Ibu Susani,S,IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2020 mengatakan:

“Persyaratan jelas mas, bisa dilihat melalui aplikasi antrian online kita juga, dan di setiap UPT juga terdapat informasi untuk persyaratan perekaman e-Ktp.”

Menurut Bapak A. Jenudin (Staff Teknis Disdukcapil di Kecamatan Tarub) pada tanggal 19 Januari 2021 mengatakan;

“Persyaratan untuk melakukan perekaman jelas sekali mas, yaitu Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Pengantar rt/rw dan lain2. Udah jelas tercantum di papan informasi ko mas.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat perekaman e-Ktp yang diberikan sudah cukup jelas dan tersedia di papan informasi, serta disosialisasikan di kelurahan ketika ada masyarakat yang akan membuat e-KTP. Selain itu juga syarat-syarat dapat dilihat pada aplikasi antrian online Disdukcapil.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apa yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya dalam melakukan Perekaman e-KTP?

Menurut Bapak A. Jenudin (Staff Teknis Disdukcapil di Kecamatan Tarub) pada tanggal 19 Januari 2020 mengatakan:

“Kalo untuk kendala mengenai perekaman e-KTP sih seringnya pada teknisnya sih mas, alatnya kadang ngadat, atau problem, cuman itu bisa ditangani langsung karena kita juga sebelumnya dibekali bimbingan teknis untuk penggunaan alatnya mas, jadi tidak ada kendala yang berarti, lancar aja”

Menurut Bapak Ahmad (Staff Teknis Disdukcapil di Kecamatan Talang) pada tanggal 19 Januari 2021 mengatakan;

“Untuk kendala pada perekaman sih tidak ada mas, kita selalu lakukan secara maksimal. Kadang paling kalo hari-hari tertentu itu banyak masyarakat yang ingin melakukan perekaman, jadi antrian rada panjang, karena itu mungkin agak kurang nyaman buat buat masyarakat. Tapi sejauh ini lancar aja mas.”

Menurut Ibu Sri Wahyuni (Staff Teknis Disdukcapil di Kecamatan Keramat) pada tanggal 19 Januari 2021 mengatakan;

“Untuk kendala selama perekaman e-KTP sihh kadang jaringannya gangguan mas, jadi untuk menginput data dan dikirimkan ke pusat itu terhambat, jadi kalo jaringannya error yaa terpaksa lama penyelesaian perekamannya mas.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam perekaman eKtp ada dua yaitu kendala teknis dan kendala jaringan, kendala teknis sendiri itu kendala yang berhubungan dengan terkendalanya alat untuk melakukan perekaman, yang menjadikan proses perekaman

terhambat, kendala ini bukan kendala besar dan dapat langsung ditangani oleh petugas. Kemudian kendala jaringan itu ketika jaringan online atau internet yang menghubungkan ke database terganggu atau error, sehingga proses pengiriman data untuk verifikasi terhambat yang mengakibatkan lamanya proses perekaman.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Bagaimana dengan kepastian waktu selama Perekaman di Disdukcapil ini? Apakah sudah sesuai atau sering terlambat dalam penyelesaiannya?

Menurut Bapak A. Jenudin (Staff Teknis Disdukcapil di Kecamatan Tarub) pada tanggal 19 Januari 2021 mengatakan:

“Untuk kepastian waktu sesuai mas, tapi itu tergantung jaringannya juga mas, kalo jaringan lancar yaa prosesnya bisa cepet, kalo jaringannya lagi error atau ada gangguan yaa prosesnya kada lumayan lama.”

Menurut Ibu Susani,S,IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Tergantung jaringannya, kalo tidak ada gangguan yaa cepet mas, Cuma kalo lagi error yaa bisa lama, tapi dari kita sudah maksimal sekali.”

Menurut Ibu Sri Wahyuni (Staff Teknis Disdukcapil di Kecamatan Keramat) pada tanggal 19 Januari 2021 mengatakan;

”Sudah sesuai mas, untuk proses perekaman memang tidak butuh waktu lama.”

Menurut Ibu siti aisyah (Masyarat) pada tanggal 15 Januari 2021 mengatakan:

“Saya lihat untuk perekaman sudah cukup cepat mas, cuman untuk cetaknya harus nunggu cukup lama sampai jadi hasilnya mas, kalo masyarakat yg bener-bener butuh e-Ktp cepat kan kadang merasa diperlama mas.”

Menurut Bapak Cahyono (Masyarakat) pada tanggal 15 Januari 2021 mengatakan:

“Proses perekamannya cepat mas, Cuma antriannya itu cukup panjang jadi memang lama ngantrinya mas, belum lagi kalo jaringan error. Tambah lama.”

Berdasarkan wawancara dengan 5 informan maka dapat disimpulkan bahwa kepastian waktu dalam proses perekaman sudah sesuai dan cukup cepat. Namun cepat atau tidaknya perekaman lebih sering tergantung pada jaringan database, jika jaringan sedang terkandala maka mau tidak mau proses pengiriman data perekaman akan terhambat dan proses perekaman akan lebih lama.

- 5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apakah pegawai di Disdukcapil dalam memberi pelayanan perekaman e-KTP sudah disiplin untuk menjalankan tugasnya?

Menurut Ibu Susani,S,IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Menurut saya sih pegawai Disdukcapil dalam memberi pelayanan e-KTP sudah disiplin mas, tiap ada masyarakat langsung dikerjakan mas, dan prosesnya juga sesuai jadwal.”

Jadi petugas memang sudah disiplin baik dikecamatan maupun disdukcakil.”

Menurut Bapak Samiaji (Masyarakat Kecamatan Keramat) pada tanggal 14 Januari 2021 mengatakan:

“Disiplin mas, untuk jadwalnya juga jelas dan pelayanan yang diberikan juga cepat.”

Menurut Bapak Torikun (Masyarakat) pada tanggal 15 Januari 2021 mengatakan:

“Saya kira petugas di kecamatan cukup disiplin dan baik mas dalam memberikan pelayanan, mereka juga tidak sungkan untuk memberi pengarahan apabila ada masyarakat yang bingung terkait persyaratannya.”

Menurut Bapak Cahyono (Masyarakat) pada tanggal 21 Januari 2020 mengatakan:

”Petugas disini (UPT Kecamatan Tarub) disiplin mas, setiap ada masyarakat datang langsung dilayani mas, tidak menunda-nunda atau memperlama”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa Petugas di Disdukcakil sudah disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dibuktikan dari wawancara dengan masyarakat yang sudah merasa cukup baik dilayani oleh disdukcakil.

Dari kelima pertanyaan diatas mengenai Perekaman e-KTP dapat disimpulkan bahwa untuk mekanisme perekaman e-KTP adalah masyarakat datang ke Disdukcakil dengan membawa persyaratan dan untuk masyarakat yang mendapatkan surat panggilan akan dilayani terlebih dahulu, perekaman dimulai dengan

rekam sidik jari, rekam iris mata, tanda tangan digital, pas foto, dan biodata diri, setelah data terekam akan langsung dikirim ke pusat database untuk dilakukan verifikasi dan penunggalan data sebelum siap untuk di cetak, Petugas pelayanan peremakan baik di Disdukcapil maupun di UPT Kecamatan Talang, Kecamatan Tarub dan Kecamatan Kramat sudah disiplin dan ketepatan waktu juga sesuai dengan aturannya. Untuk kendala yang dihadapi dalam perekaman adalah kendala teknis dan kendala jaringan. Kendala teknis bisa langsung diatasi namun apabila terkendala jaringan error maka proses akan lebih lama.

c. Pencetakan e-KTP

Pencetakan e-KTP adalah proses pemberkasan dari penyusunan verifikasi data yang dilakukan oleh petugas.

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Bagaimanakah mekanisme Pencetakan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Tegal?

Menurut Ibu Susani,S,IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Kalau untuk pencetakan setelah data perekaman di kirim ke pusat maka akan dilakukan verifikasi dulu atau penunggalan data, setelah proses itu baru bisa siap cetak, kalo ternyata datanya ada kesalahan atau terdapat data ganda maka prosesnya bisa lebih lama sebelum masuk status siap cetak mas, jadi tidak bisa langsung dicetak, memang harus melalui proses itu dulu agar data kependudukannya valid.”

Menurut Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

”Mekanismenya mas setelah perekaman data akan dikirim kepusat dulu untuk validitasi dan verifikasi, nah selama proses itu kita hanya menunggu sampai data tersbut masuk status siap cetak, kalo sudah siap cetak berarti langsung kita cetak mas. Karena jumlah blangko terbatas jadi menetapkan prioritas mas, untuk pembuatan eKtp baru akan kami prioritaskan ketimbang yang perubahan data,”

Menurut Ibu Susani,S,IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

“Jadi untuk pencetakan itu kita menunggu hasil validitasi atau verifikasi yang dilakukan dipusat, setelah statusnya sudah siap cetak baru kita langsung cetak, untuk pencetakan kita memprioritaskan kepada yang membuat baru, karena jumlah blagko kan kan terbatas juga mas.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme dalam pencetakan e-KTP yaitu dengan mengirimkan data biometrik hasil perekaman wajib e-KTP ke database pusat untuk di verifikasi dan validitasi data, setelah proses tersebut selesai kemudian masuk status siap cetak. Namun karena jumlah blangko yang terbatas maka dilakukan prioritas cetak, disdukcapil memprioritaskan pada pembuatan baru e-KTP. Jadi untuk wajib e-KTP yang baru membuat e-KTP akan diprioritaskan untuk dicetak terlebih dahulu.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apakah masyarakat yang sudah melakukan perekaman langsung mendapatkan cetak e-KTP?

Menurut Ibu Susani,S,IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

“Tidak mas, harus menunggu beberapa waktu untuk verifikasi dan validitasi data dulu mas, kadang sampe 2-3 hari, itu juga kalo ketersediaan blangko mencukupi, kalo blangkonya kurang yaa terpaksa harus menunggu lebih lama mas”

Menurut Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Paling tidak menunggu 2-3 hari mas, tidak bisa langsung jadi karena data harus melalui verifikasi dan validitasi data dulu mas, biar datanya valid dan tunggal setiap warga. Setelah proses itu selesai baru data siap di cetak.”

Menurut Ibu Sri Wahyuni (Staff Teknis Disdukcapil di Kecamatan Keramat) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

“Biasanya hasil cetaknya sekitar 2-3 hari mas, itu kalo cepet dan blangkonya ada, kalo blangkonya kurang yaa terpaksa bisa lama, kalo pencetakan itu hanya di kantor Disdukcapil mas, setelah itu baru hasil cetaknya di serahkan ke kami dikecamatan untuk diberikan ke wajib e-Ktp tersebut.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang sudah melakukan perekaman tidak bisa langsung mendapatkan cetak e –Ktp, hal ini karena data biometrik harus dikirimkan kepusat terlebih dahulu untuk di verifikasi dan validitasi data, agar data setiap warga tunggal dan

valid sebelum akhirnya siap dicetak. Lama tidaknya pencetakan juga tergantung pada ketersediaan blangko, jumlah blangko yang terbatas sering menjadi kendala lamanya proses pencetakan e-Ktp.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Bagaimana dengan kepastian waktu selama pencetakan, apakah sering terlambat dalam penyelesaiannya?

Menurut Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Untuk kepastian waktu kita tergantung pada verifikasi dan validasi data pada database dipusat mas, biasanya sih 2-3 hari kalo jaringannya lancar, kadang juga ada yg lama, terus juga kita melihat ketersediaan blangko yang terbatas mas, dari puasat juga seringnya distribusi blangko sering telat dan jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang kita ajukan.”

Menurut Ibu Susani,S,IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

“Kalo semuanya lancar dan blangkonya mencukupi yaa bisa cepet semua mas, cuman kadang kan blangkonya kurang dan dari pusat itu distribusinya ga sesuai dengan apa yang kita ajukan. Jadi yaa terpaksa rada lama mas.”

Menurut Ibu Astidar,SE (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan

“seperti yang saya katakatan yah mas, semuanya tergantung jaringan , terus alat cetaknya ngk ngadat atau eror untuk ketepatan waktu paling lambat 2 atau 3 hari sudah bisa jadi cetak e-KTP, dan insya allah sudah sesuai ,kalo statusnya sudah PRR ya bisa langsung cetak e-KTP.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa kepastian waktu selama pencetakan, apakah sering terlambat dalam penyelesaiannya , Untuk kepastian waktu selama pencetakan e-KTP itu tergantung pada verifikasi dan validitasi data pada database dipusat, biasanya paling lambat 2 atau 3 hari sudah bisa dicetak, ketersediaan blangko juga merupakan salah satu penghambat selama pembuatan cetak e-KTP dan juga tergantung pada jaringan.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apa yang menjadi kendala dan bagaimana solusinya dalam melakukan Pencetakan e-KTP?

Menurut Ibu Astidar,SE (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan

”Untuk kendala tersendiri jelas pada ketersediaan blangko yang sering kekurangan, jadi pencetakan sering ditunda mas karena blangkonya habis, harus nunggu distribusi lagi dari pusat, karena blangkonya memang diberi oleh pusat mas, kita hanya mengajukan, terkadang jumlah yang datang sering tidak sesuai dengan apa yang diajukan.”

Menurut Ibu Susani,S,IP (selaku Kepala Dinas dan Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan

“Untuk kendala yang sering itu di blangko mas, memang itu kendala umumnya, yaa walaupun tidak separah dulu tapi ketersediaan blangko masih sering kurang mencukupi mas, jadi untuk mencetak sering terhambat.”

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan

“Seperti yang saya katakan yah mas untuk kelo pencetakan selama blangkonya masih tersedia yaa tidak ada kendala.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa kendala dalam pencetakan e-Ktp adalah ketersediaan blangko yang terbatas dan terkadang tidak sesuai dengan jumlah pemerekaman yg sudah masuk, hal ini sering membuat terlambatnya proses pencetakan.

- 5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apakah kompetensi pegawai dalam melaksanakan pelayanan pencetakan e-KTP sudah baik dan layak?

Menurut Ibu Susani,S,IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 20 Januari 2020 mengatakan:

“Untuk kompetensi pegawai sudah cukup baik mas , karena setiap harinya pasti ada dari pihak kecamatan datang ke disdukcapil , kadang konsultai mengenai hal yang ada dilapangan”

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Kalo mengenai kopetensi pegawai saya kira sudah cukup baik mas , kalo jaringan, alatnya tidak ada gangguan semuanya bisa dilakukan dengan baik , terkadang kan kendalanya ya itu jaringanya ngadat jadi itu salah satu kendalanya.”

Menurut Ibu Astidar,SE (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan

“Bahwa untuk mengenai kompetensi pegawai selama ini sudah terjalin dengan baik mas , semua kendala sudah bisa diatasi dengan baik, kecuali jika jaringanya ngadat itu bisa memperlambat pembuatan cetak e-KTP”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa Untuk Mengenai kompetensi pegawai dalam membuat pencetakan e-KTP sudah baik , dikatakan sudah baik karena pegawai jika ada suatu kendala pasti lapor ke pusat lalu pusat memberi solusi untuk mempercepat pembuatan e-KTP.

Dari kelima pertanyaan diatas mengenai Pencetakan e-KTP dapat disimpulkan bahwa pencetakan dilakukan setelah data biometrik yang sebelumnya direkam dikirimkan dahulu ke database pusat untuk proses verifikasi dan validitasi data sebelum akhirnya masuk status siap cetak. Setelah data siap cetak maka disdukcapi akan segera mencetak e-KTP, pencetakan e-KTP memprioritaskan untuk pembuat baru agar dicetak terlebih dahulu ketimbang yang perubahan data, hal ini karena terbatasnya jumlah blangko. Terbatasnya jumlah blangko juga menjadi kendal utama dalam proses pencetakan selain jaringan. sementara itu untuk kompetensi pegawai dalam pencetakan sudah maksimal dan baik.

d. Penerbitan e-KTP

Penerbitan e-KTP adalah proses penyelesaian verifikasi dan penyelesaian data kepada kartu fisik

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Bagaimana mekanisme dalam penerbitan dokumen?

Menurut Ibu Susani,S,IP Bapak Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

”Menegenai penerbitan bisa di ajukan melalui pengantrian online mas , juga bisa melalui perkecamatan jika cetak e-KTP sudah jadi maka akan langsung didistribusikan ke kecamatan untuk langsung di serahkan pada masyarakat. Masyarakat bisa langsung mengambil di kecamatan dengan membawa surat keterangan yang seblumnya diberikan pada waktu perekaman.”

Menurut Ibu Astidar,SE (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan

“untuk penerbitan langsung kita serahkan pada UPT di paten kecamatan mas, jadi masyarakat tinggal ke kecamatan sesuai dengan jadwal yang ada pada surat keterang ke kecamatan untuk mengambil e-KTP. Jika sudah jadi maka bisa diambil langsung.”

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Mekanismenya ya setelah e-KTP sudah di cetak kita distribusikan ke tiap UPT yang ada dikecamatan, nanti masyarakat bisa mengambil di kecamatan masing-masing.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerbitan e-KTP mekanismenya adalah setelah e-KTP sudah dicetak maka akan langsung di distribusikan kepada setiap UPT yang ada dikecamatan, masyarakat bisa langsung mengambil e-KTP tersebut di kecamatan dengan

membawa bukti diri, baik Surat Keterangan (Suket) atau Kartu Keluarga.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apakah penting dalam penerbitan dokumen terkait program e-KTP?

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Ya jelas sangat penting mas, Karena kan e-Ktp tujuannya agar masyarakat dapat kartu identitas diri, jadi ya memang harus ditebitkan.”

Menurut Ibu Astidar,SE (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengataka:

“Untuk penerbitan dokumen terkait dengan e-KTP Ya menurut saya penting sekali mas,karena kan untuk mengetahui data dokumen masyarakat yang sudah melakukan perekaman dan yang belum melakukan perekaman e-KTP”

Menurut Ibu Susani,S.IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

“Penting mas, karena memang harus diterbitkan setiap e-KTP, karena itu kan untuk data diri masyarakat.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan dalam e-KTP sangat penting, karena memang tujuan e-KTP adalah untuk untuk memberikan data diri setiap masyarakat, sehingga memang harus diterbitkan.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Penerbitan seperti apakah yang sudah diterapkan dalam program e-KTP?

Menurut Ibu Astidar,SE (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

“Penerbitan e-KTP mas, kalo memang e-KTP belum bisa diterbitkan karena kurangnya blangko atau ada kendala lain maka kami memberikan SUKET (Surat Keterangan) Pengganti e-Ktp sementara, yang bisa digunakan masyarakat sebelum e-KTP jadi.”

Menurut Ibu Susani,S.IP (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

“Kita menerbitkan e-KTP dengan didistribusikan langsung pada tiap kecamatan, jadi masyarakat tinggal mengambil e-Ktp di masing-masing kecamatan.”

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan;

“Ya kita menerbitkan e-KTP yang langsung didistribusikan kepada masyarakat melalui Kecamatan dan jikalau status masih belum siap cetak maka akan diserahkan SUKET (surat keterangan) sebagai pengganti e-KTP sementara.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa Penerbitan yang dilakukan oleh disdukcapil adalah dengan mendistribusikan e-KTP kesetiap UPT kami di Kecamatan, ketika e-KTP belum bisa dicetak atau terkendala blangko, maka kami akan memberikan masyarakat Surat

Keterangan Pengganti e-KTP yang bisa digunakan masyarakat sementara sebelum e-KTP jadi.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apakah penerbitan yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam program e-KTP sudah baik dan sesuai aturan yang berlaku?

Menurut Ibu Susani,S.IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Tentunya sudah sangat baik mas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, mengingat masyarakat yang sudah melakukan perekaman dapat sesegera mungkin diterbitkan dan dicetak e-KTP tersebut dalam bentuk fisik asalkan masih tersediannya blangko.”

Menurut Ibu Astidar,SE (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Ya tentu sudah baik mas dan mengikuti semua prosedur ataupun aturan yang berlaku dalam penerbitan e-KTP yang kita laksanakan, yang penting kuota dari blangko masih tersedia maka penerbitan akan lebih lancar.”

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Pastinya sudah baik mas dalam penerbitan e-KTP kepada masyarakat dan tentu kami melaksanakannya dengan mengikuti aturan yang berlaku.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerbitan yang dilakukan oleh Disdukcapil sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan,

penerbitan bisa berjalan cepat jika ketersediaan blangko mencukupi.

- 5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apakah yang menjadi kendala mengenai penerbitan program e-KTP?

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Kendalanya yakni ketersediaan blangko dan jaringan yang terkadang eror yang membuat proses dalam penerbitan e-KTP menjadi terhambat.”

Menurut Ibu Sussani S,IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Kendala dari penerbitan e-KTP yakni kurangnya blangko dan jaringan yang terkadang sulit di akses mas.”

Menurut Ibu Astidar, SE (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Ya kendalanya kurangnya blanko dan jaringan yang tidak stabil mas akhirnya penerbitan menjadi terhambat.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penerbitan adalah ketersediaan blangko yang terkadang kurang memenuhi, sehingga ada masyarakat yang merasa bahwa proses e-KTP lama terbitnya.

Dari kelima pertanyaan diatas mengenai Penerbitan e-KTP dapat disimpulkan bahwa proses penerbitan dilakukan dengan

mendistribusikan e-KTP yang sudah dicetak ke setiap kecamatan, jadi masyarakat bisa langsung mengambil di kecamatan masing-masing. Sejauh ini pelaksanaan penerbitan sudah sesuai dengan aturan dimana masyarakat yang ingin mengambil harus menyertakan bukti diri seperti Kartu keluarga ataupun Suket. Kendala dalam penerbitan masih terdapat pada blangko yang terbatas pada proses pencetakan sehingga memperlama proses penerbitan e-KTP. Untuk itu Disdukcapil akan memberikan Surat Keterangan Pengganti e-KTP (Suket) untuk sementara sebelum e-KTP dapat diterbitkan.

e. Sarana dan Prasarana Penunjang e-KTP

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

- 1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apakah sarana prasarana yang tersedia dalam pelayanan e-KTP sudah cukup memadai?

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Soal sarana dan prasarana penunjang sudah untuk perekaman dan pencetakan sudah memadai, cuman untuk ketersediaan blangko memang kadang sering kurang, tapi itu kan distribusi dari pusat, kita hanya mengajukan sesuai

jumlah yang dibutuhkan, tetapi dari pusat kan ngasih blangkonya juga terbatas..”

Menurut Ibu Susani,S.IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 20 Januari 2020 mengatakan:

“Sejauh ini sudah cukup memadai mas dalam mencetak e-KTP tersebut.”

Menurut Ibu Astidar, SE. (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Ya cukup memadai mas berkaitan dengan sarana dan prasarana penunjang pencetakan, perekaman e-KTP. Jadi kalo blangkonya memang mencukupi yaa lancar saja mas”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelayanan e-KTP sudah baik, mulai dari sarana untuk perekaman, alat cetak e-KTP sudah memadai, namun untuk ketersediaan blangko memang Disdukcapil dalam hal ini tergantung distribusi dari pusat, jumlah distribusi blangko yang kadang tidak sesuai dengan apa yang diajukan membuat proses pencetakan tidak bisa seluruhnya dicetak semua dalam satu waktu.

- 2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apakah sarana dan prasarana yang tersedia masih dalam kondisi yang baik?

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Sangat baik kondisi dari sarana dan prasarana penunjang mas dilihat dari performa alat tersebut.”

Menurut Ibu Astidar, SE. (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Ya sangat baik mas sejauh ini sarana dan prasarana berjalan dengan maksimal.”

Menurut Ibu Susani, S.IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Sejauh ini sudah baik mas, berkaitan dengan sarana dan prasarana terkait pencetakan e-KTP.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia masih dalam kondisi yang baik. Dari alat perekaman, pencetakan maupun sistem jaringan.

- 3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apakah ada keluhan dari masyarakat terkait sarana dan prasana dalam pelaksanaan e-KTP?

Menurut Ibu Susani, S.IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Keluhan dari masyarakat cuman waktu dalam pencetakan kadang agak lama mas, karena memang kurangnya blangko yang didistribusikan dari pusat sampai ke Kabupaten membutuhkan waktu yang lebih.”

Menurut Ibu Astidar, SE. (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Keluhan masyarakat paling waktu pencetakan yang lama mas karena memang kami melihat ketersediaan blangko dari pusat yang minim.”

Menurut Ibu siti Aisyah (Masyarakat) pada tanggal 15 Januari 2021 mengatakan:

“Ada mas, yakni informasi dari pihak PATEN kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan.”

Menurut Bapak Torikun (Masyarakat) pada tanggal 15 Januari 2021 mengatakan:

“Ya cuman pencetakannya saja mas yang lama, serta tidak ada informasi yang pasti dari pihak PATEN.”

Menurut Bapak Cahyono (Masyarakat) pada tanggal 20 Januari 2021 mengatakan:

“Informasi dari PATEN simpang siur mas, tidak pasti dan tidak menentu soal pencetakan e-KTP.”

Berdasarkan wawancara dengan 5 informan maka dapat disimpulkan bahwa keluhan dari masyarakat adalah terkait lamanya proses pencetakan dan tidak jelasnya informasi terkait kapan diterbitkannya e-KTP masyarakat, sehingga masyarakat harus sering bolak-balik ke kecamatan untuk mengecek e-KTP mereka, Disdukcapil mengkonfirmasi bahwa memang ketersediaan blangko yang terbatas sering menghambat proses pencetakan yang mengakibatkan tertundanya penerbitan e-KTP untuk masyarakat.

- 4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Bagaimana tindak lanjut ketika ada keluhan dari masyarakat terkait sarana dan prasarana e-KTP?

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Pastinya kami menjelaskan kepada masyarakat berkaitan dengan kurangnya blangko yang mengakibatkan informasi tidak menentu berkaitan pencetakan e-KTP dan kami menyarankan pencetakan SUKET (surat keterangan) untuk sementara waktu.”

Menurut Ibu Astidar, SE. (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Tentunya kami menginformasikan kepada masyarakat berkaitan dengan telatnya pencetakan e-KTP dan kami memberikan SUKET (surat keterangan) sementara untuk digunakan pengganti e-KTP.”

Menurut Ibu Susani,S,IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Ya kami memberikan SUKET (surat keterangan) kepada masyarakat untuk digunakan sementara waktu karena SUKET (surat keterangan) tersebut legal untuk menanggulangi ketidaktersediaannya blangko yang ada.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut apabila ada keluhan dari masyarakat terkait lamanya penerbitan e-KTP adalah dengan memberi pemahaman dan informasi kepada masyarakat bahwa memang jumlah blangko yang tersedia terbatas, selain itu juga Disdukcapil akan memberikan SUKET (Surat Keterangan pengganti E-KTP) yang bisa digunakan masyarakat sebagai

pengganti e-KTP untuk sementara sampai e-KTP masyarakat diterbitkan.

- 5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Menurut Bapak/Ibu/Sdr Apa kendala yang sering dihadapi terkait sarana prasarana dan bagaimana solusi yang dilakukan oleh Disdukcapil?

Menurut Bapak Endro Nue Susilo S.Sos.MM (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan berupa kurangnya blangko serta jaringan internet yang terhubung ke pusat database, kadang mengalami eror/down mas. Solusinya ya kita mengakalinya dengan pembuatan SUKET (surat keterangan) sebagai pengganti e-KTP sambil menunggu pengiriman blangko dan kalau masalah jaringan internet kami sebisa mungkin untuk menangani masalah tersebut dengan menginput data secara manual.”

Menurut Ibu Astidar, SE. (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Ya kendalanya cuman di kurangnya blangko dan juga jaringan internet yang terkadang mengalami problem mas, hal tersebut bisa ditangani dengan pencetakan SUKET (surat keterangan) serta penanganan dengan manual.”

Menurut Ibu Sussani, S,IP (selaku Staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tanggal 21 Januari 2021 mengatakan:

“Permasalahannya cuman kurangnya blangko serta jaringan yang kadang sering down mas, cara penanganannya berupa pembuatan SUKET (surat keterangan) dan penginputan data manual sambil menunggu sistem jaringan internet normal.”

Berdasarkan wawancara dengan 3 informan maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi terkait sarana prasarana

adalah kurangnya blangko serta jaringan internet yang menghubungkan ke database pusat yang kadang error, sehingga menyebabkan sering terhambatnya proses perekaman dan pencetakan e-KTP. Untuk itu Disdukcapil mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti e-KTP (SUKET) yang bisa digunakan masyarakat sementara, sebelum e-KTP mereka dicetak dan diterbitkan.

Dari kelima pertanyaan diatas mengenai sarana dan prasarana penunjang e-KTP dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sudah memadai dan dalam keadaan baik, mulai dari alat perekaman, pencetakan yang tersedia masih berfungsi maksimal, namun untuk ketersediaan blangko yang merupakan bahan utama dalam pembuatan e-KTP masih terbatas, Disdukcapil mengatakan bahwa distribusi dari pemerintah juga terbatas yang kadang tidak sesuai dengan apa yang disdukcapil ajukan sebelumnya. Sehingga menyebabkan penerbitan e-KTP untuk masyarakat menjadi lama karena blangko untuk mencetak terbatas. Hal ini dikeluhkan oleh masyarakat, selain itu juga informasi di kecamatan terkait kapan terbitnya e-KTP masyarakat kurang jelas yang membuat masyarakat harus bolak-balik ke kecamatan untuk memastikan e-KTP mereka.

Berdasarkan kesimpulan dari lima indikator diatas terkait Implementasi Program e-Ktp maka peneliti simpulkan lagi untuk unit

analisis pertama yaitu mobilisasi penduduk didapati bahwa mobilisasi penduduk dilaksanakan melalui koordinasi dengan kecamatan. Pelaksanaannya dilakukan dengan mendistribusikan surat pemanggilan wajib e-KTP, kemudian wajib e-KTP datang ke kantor Disdukcapil atau UPT Disdukcapil yang ada di kecamatan untuk melakukan perekaman berdasarkan jadwal yang tertera, ini untuk menghindari antrian panjang. Penduduk yang datang dengan surat pemanggilan akan lebih didahulukan dalam pelayanan.

Unit analisis yang kedua yaitu perekaman e-KTP didapati bahwa proses perekaman e-KTP dimulai dengan masyarakat datang ke Disdukcapil dengan membawa persyaratan dan untuk masyarakat yang mendapatkan surat panggilan akan dilayani terlebih dahulu, setelah data terekam akan langsung dikirim kepusat database untuk dilakukan verifikasi dan pununggalan data sebelum siap untuk di cetak, Petugas pelayanan perekaman sudah disiplin dan ketepatan waktu juga sesuai dengan aturannya. Untuk kendala yang dihadapi dalam perekaman adalah kendala teknis dan kendala jaringan. Kendala teknis bisa langsung diatasi namun apabila terkendala jaringan error maka proses akan lebih lama.

Untuk unit analisis yang ketiga yaitu pencetakan e-KTP didapati bahwa sebelum melakukan pencetakan data biometrik yang sebelumnya direkam harus dikirimkan dahulu ke database pusat untuk proses verifikasi dan validitasi data sebelum akhirnya masuk status siap cetak. Setelah data siap cetak maka disdukcapil akan segera mencetak e-KTP, pencetakan e-

KTP memprioritaskan untuk pembuat baru agar dicetak terlebih dahulu ketimbang yang perubahan data, hal ini karena terbatasnya jumlah blangko. Terbatasnya jumlah blangko juga menjadi kendal utama dalam proses pencetakan selain jaringan.

Unit analisis yang keempat yaitu Penerbitan e-KTP didapati bahwa penerbitan dilakukan dengan mendistribusikan e-KTP yang sudah dicetak ke setiap kecamatan, dan masyarakat bisa langsung mengambil di kecamatan masing-masing. Sejauh ini pelaksanaan penerbitan sudah sesuai dengan aturan dimana masyarakat yang ingin mengambil harus menyertakan bukti diri. Kendala dalam penerbitan masih terdapat pada blangko yang terbatas pada proses pencetakan sehingga memperlama proses penerbitan e-KTP. Untuk itu Disdukcapil akan memberikan Surat Keterangan Pengganti e-KTP (Suket) untuk sementara sebelum e-KTP dapat diterbitkan.

Unit analisis yang kelima yaitu sarana dan prasarana penunjang e-KTP didapati bahwa kelengkapan dan kondisi bahwa sarana dan prasarana sudah memadai dan dalam keadaan baik, mulai dari alat perekaman, pencetakan yang tersedia masih berfungsi maksimal, namun untuk ketersediaan blangko yang merupakan bahan utama dalam pembuatan e-KTP masih terbatas, . Sehingga menyebabkan penerbitan e-KTP untuk masyarakat menjadi lama Hal ini yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, selain itu juga informasi dari kecamatan terkait kapan terbitnya e-KTP

masyarakat kurang jelas yang membuat masyarakat harus bolak-balik ke kecamatan untuk memastikan e-KTP mereka.

Dari poin diatas diperoleh fakta bahwa implementasi Program e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Tegal pada prakteknya memang dijalankan dengan baik, mulai dari mobilasi penduduk yang mana dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama setiap kecamatan dalam distribusi surat pemanggilan wajib e-KTP. Sementara itu untuk proses pelayanan e-KTP mulai dari Perekaman, pencetakan dan Penerbitan e-KTP sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun ada beberapa hal yang menjadi kendala, yang paling utama adalah ketersediaan blangko yang terbatas dan sering tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kemudian kendala teknis dan jaringan internet yang menghubungkan kedalam database. Jadi memang kendala terserbut yang sangat menghambat dan membuat penerbitan e-KTP menjadi lama. Distribusi blangko dari pemerintah pusat yang terbatas mengharuskan Disdukcapil harus membuat solusi untuk mengatasinya salah satunya adalah dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa blangko yang tersedia memang tidak cukup sehingga harus lebih sabar, selain itu juga Disdukcapil mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti e-KTP (Suket) untuk sementara yang bisa digunakan masyarakat sebelum e-KTP masyarakat diterbitkan.

V.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Implementasi dengan unit analisis: 1) Komunikasi, diketahui bahwa petugas

pelayanan e-KTP Disdukcapil sudah memberikan kejelasan informasi terkait syarat pembuatan e-KTP, dan untuk pemberian informasi juga sudah bisa dilihat di papan informasi dan media online, namun untuk kejelasan kapan diterbitkannya e-KTP belum baik, hal ini menyebabkan masyarakat harus menunggu lama dan sering bolak-balik ke kantor hanya untuk memastikan kapan e-KTP mereka diterbitkan dan bilamana ada kesalahpahaman disdukcapil segera memberikan solusi kepada masyarakat agar tidak ada lagi kesalahpahaman. Unit analisis, 2) Sumber daya diketahui bahwa untuk jumlah petugas Disdukcapil sudah cukup, dan bilamana terjadi suatu membludaknya jumlah masyarakat yang membuat e-KTP ini membuat petugas sedikit kewalahan, tapi sejauh ini sudah berjalan dengan baik tanpa ada hal hal yang merugikan dan Disdukcapil juga mampu memiliki kemampuan/ketrampilan yang mampu melaksanakan program e-KTP sesuai dengan yang diharapkan, baik dari segi bicara dan actionya serta sudah memiliki petugas yang berpengalaman mengenai pembuatan e-KTP. Unit analisis, 3) Disposisi, diketahui bahwa Sikap aparaturnya pelaksana sudah cukup bagus, baik dari cara penyampaian sesuai tugas pokok dan fungsinya sudah dipahami setiap aturan yang sudah diterapkan dan warga masyarakat sangat antusias mengenai pelaksanaan e-KTP , meskipun kadang agak lama prosesnya namun petugas benar benar berusaha memberikan pelayanan yg terbaik, meskipun terkadang kewalahan namun petugas disdukcapil berusaha bekerja semaksimal mungkin. Unit analisis, 4) struktur birokrasi diketahui bahwa Disdukcapil Kabupaten Tegal dalam memberikan pelayanan e-KTP kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang berdasarkan aturan. Prosedur dalam pelaksanaannya sudah fleksibel dan tidak

rumit sehingga petugas dapat memberikan pelanan e-KTP yang maksimal untuk masyarakat, Disdukcapil juga mau menerima keluhan dari masyarakat terkait pelayanan e-KTP dan akan langsung mengkonfirmasi untuk segera diberikan solusi, keluhan lebih banyak pada kendala jaringan dan kurangnya ketersediaan blangko yang membuat proses penerbitan e-KTP menjadi lebih lama.

Berdasarkan kesimpulan dari 5 unit analisis diatas maka peneliti simpulkan lagi bahwa implementasi Program e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Tegal pada prakteknya memang sudah dengan cukup baik, hal ini bisa dilihat komunikasi petugas dengan masyarakat yang baik dan ramah, hal ini didukung dari sumberdaya manusia di Disdukcapil yang sangat kompeten dan memiliki kemampuan yang memadai. namun ada kendala terkait kejelasan kapan diterbitkannya e-KTP belum baik, hal ini menyebabkan masyarakat harus menunggu lama dan sering bolak-balik ke kantor hanya untuk memastikan kapan e-KTP mereka diterbitkan.

Selanjutnya Program e-KTP dengan unit analisis: 1) Mobilisasi Penduduk, dimana bentuk kegiatannya adalah membuat surat panggilan kepada wajib e-KTP yang akan di distribusikan melalui kecamatan. Wajib e-KTP yang mendapat surat pemanggilan harus hadir ke Kantor Disdukcapil atau UPT Disdukcapil yang ada dikecamatan untuk melakukan perekaman e-KTP berdasarkan jadwal yang tertera untuk menghindari antrian yang panjang, wajib e-KTP yang datang dengan surat panggilan didahulukan dalam pelayanan. Unit analisis: 2) Perekaman e-KTP, diketahui bahwa proses perekaman adalah wajib e-KTP datang ke kantor Disdukcapil atau Kecamatan dengan membawa data diri. Kemudian perekaman

dilakukan dimulai dengan, rekam iris mata, sidik jari, tanda tangan digital, foto, dan biodata diri. Data tersebut kemudian akan di input dan dikirimkan ke database kependudukan pusat untuk di verifikasi dan validitasi sebelum akhirnya masuk status siap cetak. Kendala dalam perekaman adalah jaringan yang menghubungkan ke database terkadang terganggu sehingga proses pengiriman data terhambat. Unit analisis: 3) Pencetakan e-KTP, diketahui bahwa proses pencetakan dilakukan setelah data yang sebelumnya direkam telah di verifikasi dan validitasi sehingga bisa masuk status siap cetak. pencetakan e-KTP memprioritaskan untuk pembuat baru agar dicetak terlebih dahulu ketimbang yang perubahan data, hal ini karena terbatasnya jumlah blangko. Distribusi blangko dari pusat yang terbatas dan terkadang tidak sesuai dengan jumlah wajib e-KTP, hal ini membuat pencetakan sering terhambat dan lama. selain blangko kendala jaringan internet yang menghubungkan ke database pusat yang sering gangguan juga menjadikan semakin lama proses verifikasi dan validitasi sehingga mengakibatkan bertambah lamanya pencetakan e-KTP. Unit analisis: 4) Penerbitan e-KTP diketahui bahwa penerbitan dilakukan dengan mendistribusikan e-KTP yang sudah dicetak ke setiap kecamatan, dan masyarakat bisa langsung mengambil di kecamatan masing-masing. Sejauh ini pelaksanaan penerbitan sudah sesuai dengan aturan dimana masyarakat yang ingin mengambil harus menyertakan bukti diri. Kendala dalam penerbitan masih terdapat pada blangko yang terbatas pada proses pencetakan sehingga memperlama proses penerbitan e-KTP. Untuk itu Disdukcapil akan memberikan Surat Keterangan Pengganti e-KTP (Suket) untuk sementara sebelum e-KTP dapat diterbitkan. Unit analisis: 5)

Sarana dan Prasaran Penunjang e-KTP diketahui bahwa mulai dari alat perekaman, pencetakan yang tersedia sudah memadai dan dalam kondisi yang baik, namun untuk ketersediaan blangko yang merupakan bahan utama dalam pembuatan e-Ktp masih terbatas, . Sehingga menyebabkan penerbitan e-KTP untuk masyarakat menjadi lama dan bisa sampai berbulan-bulan hal ini tentu banyak dikeluhkan oleh masyarakat, selain itu juga informasi dikecamatan khususnya Kecamatan Talang terkait kapan terbitnya e-Ktp masyarakat kurang jelas yang membuat masyarakat harus bolak-balik ke kecamatan untuk memastikan e-KTP mereka.

Berdasarkan kesimpulan dari 5 unit analisis diatas maka peneliti simpulkan lagi bahwa Program e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Tegal telah berjalan dengan baik namun belum maksimal, proses pelayanan e-KTP mulai dari Perekaman, pencetakan dan Penerbitan e-KTP sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun ada beberapa hal yang menjadi kendala, yang paling utama adalah ketersediaan blangko yang terbatas dan sering tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kemudian kendala teknis dan jaringan internet yang menghubungkan kedalam database. Jadi memang kendala terserbut yang sangat mmenghambat dan membuat penerbitan e-KTP menjadi lama bahkan sampai berbulan-bulan masyarakat harus menunggu e-KTP mereka jadi. Disisi lain ketidak jelasan informasi mengenai kapan diterbitkannya e-KTP masyarakat sering membuat masyarakat bolak-balik ke kecamatan untuk memastikan e-KTP Mereka.

Apabila dikaitkan dengan Implementasi program e-KTP dalam prakteknya memang telah dilaksanakan dengan baik oleh Disdukcapil, namun dalam proses

pembuatan e-KTP khususnya dalam pencetakan dan penerbitan belum maksimal, hal ini terkendala oleh ketersediaan blangko yang terbatas dan tidak mencukupi serta jaringan yang menghubungkan kedatabase pusat untuk verifikasi dan validitasi kadang terganggu yang mengakibatkan proses pencetakan dan penerbitan menjadi lama, selain itu juga kurang jelasnya informasi di kecamatan terkait kapan diterbitkannya e-KTP masyarakat khususnya di Kecamatan Talang yang mengharuskan masyarakat harus bolak-balik untuk mengecek e-KTP mereka.

Mengacu pada temuan peneliti, maka kendala-kendala yang ditemui dilapangan diantaranya yakni ketersediaan blangko yang tidak memenuhi, distribusi blangko dari pemerintah pusat yang terbatas dan terkadang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan membuat proses pencetakan dan penerbitan e-KTP menjadi lama. selain itu kendala jaringan yang menghubungkan kedatabase pusat yang kadang terjadi gangguan, hal ini menyebabkan proses pengiriman data kedatabase pusat sering terkendala dan proses verifikasi dan validitasi data terhambat.

Untuk mengatasi kendala yang ada dalam penelitian ini maka solusinya yaitu memberikan yaitu memberi pemahaman kepada masyarakat bahwasannya ketersediaan yang didapat dari pemerintah pusat terbatas, dan juga disdukcapil akan memberikan SUKET (Surat keterangan pengganti e-KTP) yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti e-KTP sementara sebelum e-KTP masyarakat diterbitkan.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Implementasi Program e-KTP berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program e-KTP berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal sudah berjalan baik, namun belum maksimal, hal ini dikarenakan terkendalanya proses pencetakan yang dilakukan oleh disdukcapil karena ketersediaan blangko yang tidak mencukupi distribusi blangko dari pemerintah pusat yang terbatas menjadikan Disdukcapil kesulitan untuk mencetak data siap cetak secara keseluruhan dalam satu waktu. Selain itu juga jaringan yang menghubungkan kedatabase pusat kadang terjadi gangguan yang membuat proses verifikasi dan validitasi data memakan waktu lama. Hal ini ditambah dengan ketidakjelasan informasi di kecamatan kepada masyarakat terkait kapan diterbitkannya e-KTP masyarakat. Namun jika dilihat dari kendala yang ada, kebanyakan memang bukan menjadi kewenangan Disdukcapil karena pengadaan blangko dan teknis jaringan database pusat adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi bisa

dikatakan bahwa pelaksanaan e-KTP yang dilakukan oleh disdukcapil sudah berjalan dengan baik. Disdukcapil juga mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti e-KTP (SUKET) yang bisa digunakan sebagai pengganti e-KTP untuk sementara sampai e-KTP bisa dicetak dan diterbitkan.

2. Faktor penghambat terkait Implementasi Program e-KTP berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tegal adalah kurangnya persediaan blangko karena distribusi blangko dari pemerintah pusat yang terbatas membuat proses pencetakan dan penerbitan e-KTP terhambat. selain itu kendala jaringan yang menghubungkan kedatabase pusat yang kadang terjadi gangguan, hal ini menyebabkan proses pengiriman data kedatabase pusat sering terkendala dan proses verifikasi dan validitasi data terhambat. Untuk solusinya yaitu memberi pemahaman kepada masyarakat bahwasannya ketersediaan yang didapat dari pemerintah pusat terbatas, dan juga disdukcapil akan memberikan SUKET (Surat keterangan pengganti e-KTP) yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti e-KTP sementara.

VI.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka peneliti memberikan rekomendasi (saran) sebagai berikut :

1. Disdukcapil Kabupaten Tegal dalam pencetakan perlu memprioritaskan pada pembuatan e-KTP baru terlebih dahulu ketimbang untuk Perubahan Data e-KTP, hal ini tentu akan mendorong usaha pemerintah dalam mewajibkan e-KTP bagi warga usia diatas 17 tahun.
2. Pemerintah daerah dalam hal ini Disdukcapil perlu mengajukan permohonan kepada pemerintah agar distribusi balngko e-KTP ditambah dan disesuaikan dengan jumlah data e-KTP sehingga pencetakan e-KTP bisa berjalan dengan maksimal.
3. Disdukcapil bersama pemerintah pusat perlu mempertimbangkan penguatan jaringan yang menghubungkan kedatabase pusat agar tidak terjadi lagi gangguan sehingga proses verifikasi dan validitasi data bisa dilakukan lebih cepat.
4. Perlu ada kejelasan waktu dalam Penerbitan e-KTP oleh Disdukcapil sehingga masyarakat tidak mondar- mandir ke kecamatan hanya untuk menanyakan sudah atau belum jadinya e-KTP mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ahmad Noerdin, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Basrowi dan Siwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Darma, Agus, dkk. 2013. *Konflik di Era Otonomi Daerah dalam “Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah”*. PSKK-UGM. Yogyakarta.
- Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Pembaharuan. Yogyakarta.
- Lubis, M.S, (2018). Analisis Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk Meningkatkan Validitas Data Kependudukan. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 10 (2): 198- 204. Moeleong, Lexy. 2006. *Metode Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Neuman, W. Laurence. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT Indeks. Jakarta.
- Purba, J.F. Tarigan, U. & Nasution, I. & Suharyanto, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. PERSPEKTIF, 8 (2): 77-83.
- Saparin, Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan, Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sudjatmiko, Budiman dan Zakaria, Yondo. 2014. *Desa Kuat, Indonesia Hebat!*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Refika Aditama Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumber Peraturan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2016 *tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang *Perubahan Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Sekretariat Negara. Jakarta

